



PEMANTAUAN PERSIDANGAN KORUPSI TAHUN 2023

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW



Senin, 14 Oktober 2024

PENDAHULUAN

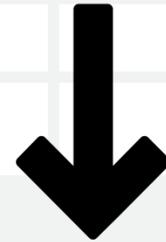
Stagnasi indeks
persepsi korupsi
2023

Carut-marut
penegakan
hukum

Penyimpangan
politik hukum
pemberantasan
korupsi

Tren Vonis 2023

METODOLOGI



WAKTU

Pemantauan tren vonis memotret persidangan perkara tindak pidana korupsi dari rentang waktu 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023

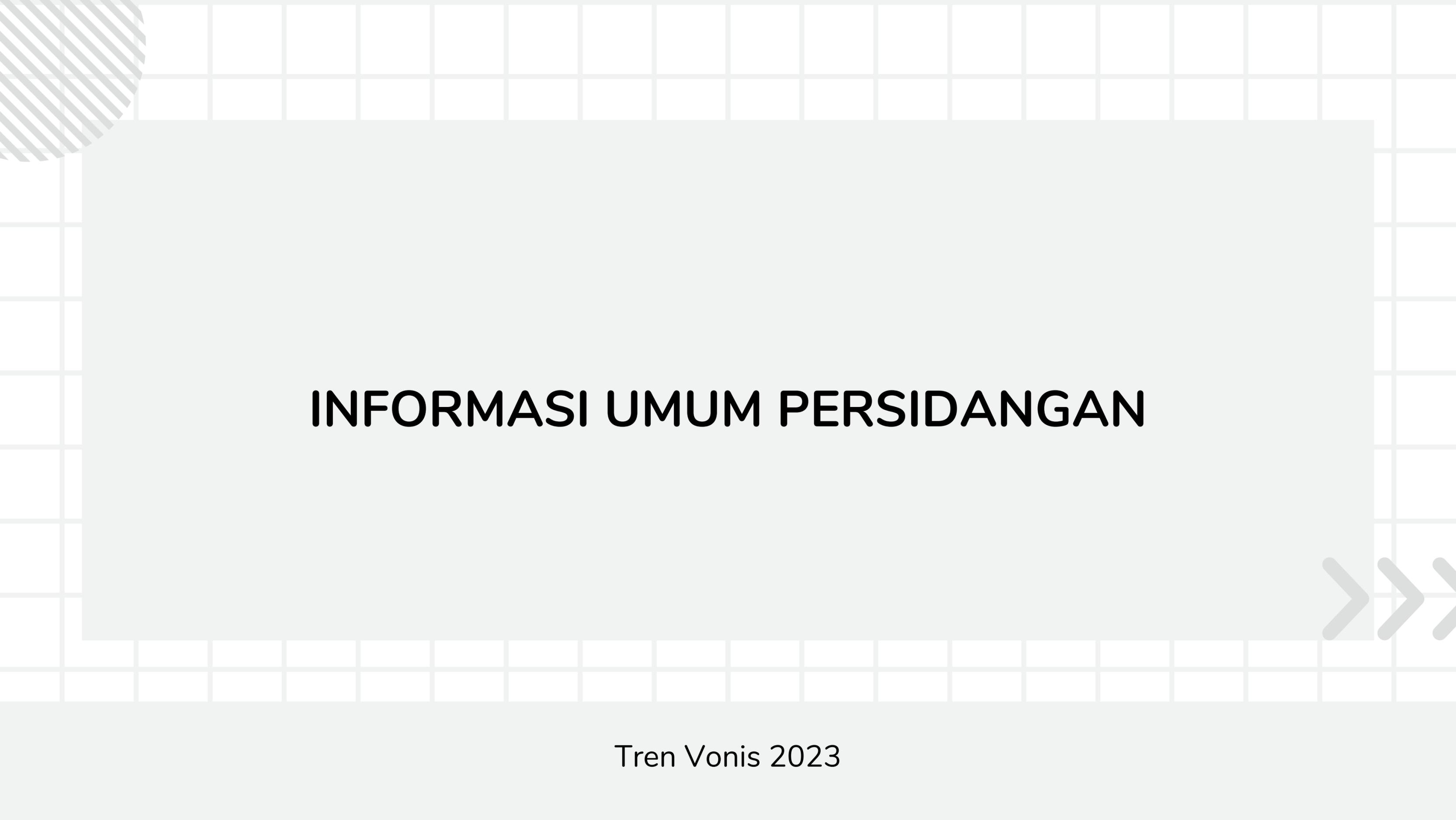


SUMBER

Sumber informasi berasal dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung

CAKUPAN BAHASAN

- Informasi Umum Persidangan
- Ulasan Dakwaan
- Substansi Surat Tuntutan
- Vonis Majelis Hakim
- Pemetaan Putusan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali



INFORMASI UMUM PERSIDANGAN

Tren Vonis 2023

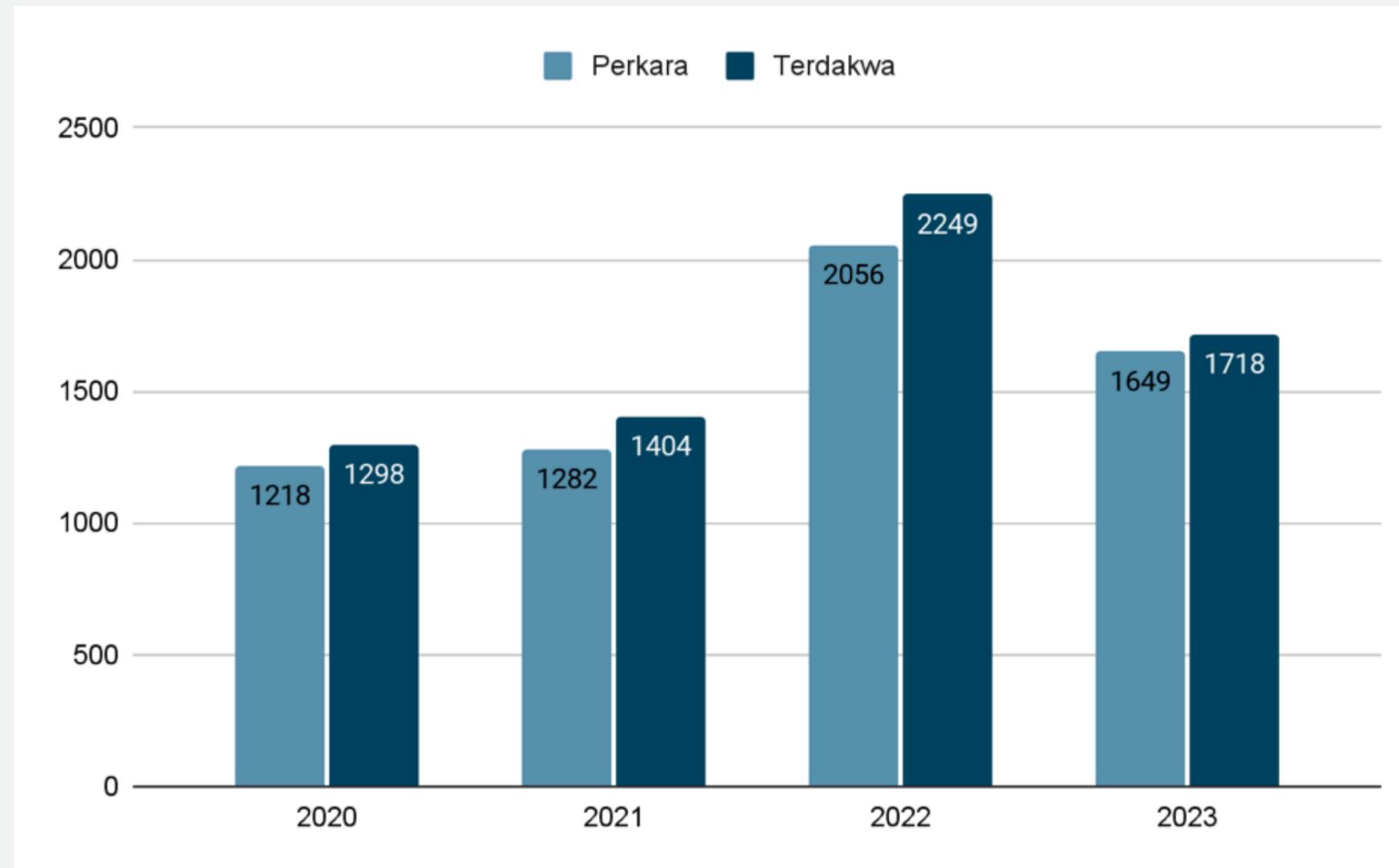
ADMINISTRASI PENGADILAN



Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

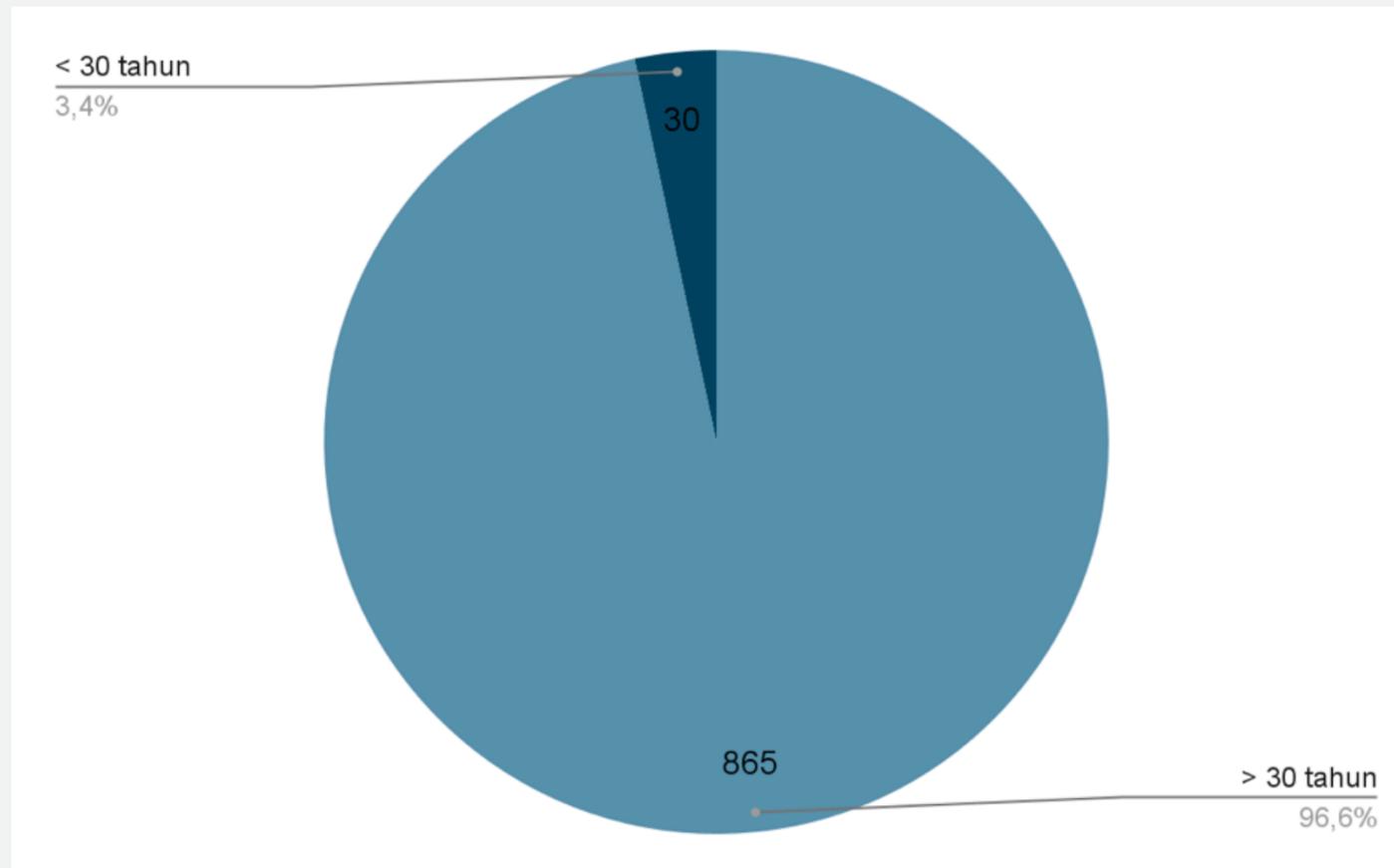
Seiring waktu, Direktori Putusan Mahkamah Agung mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sekalipun masih ada beberapa hal yang mesti ditingkatkan, khususnya proses unggah putusan dari pengadilan.

Jumlah Perkara dan Terdakwa



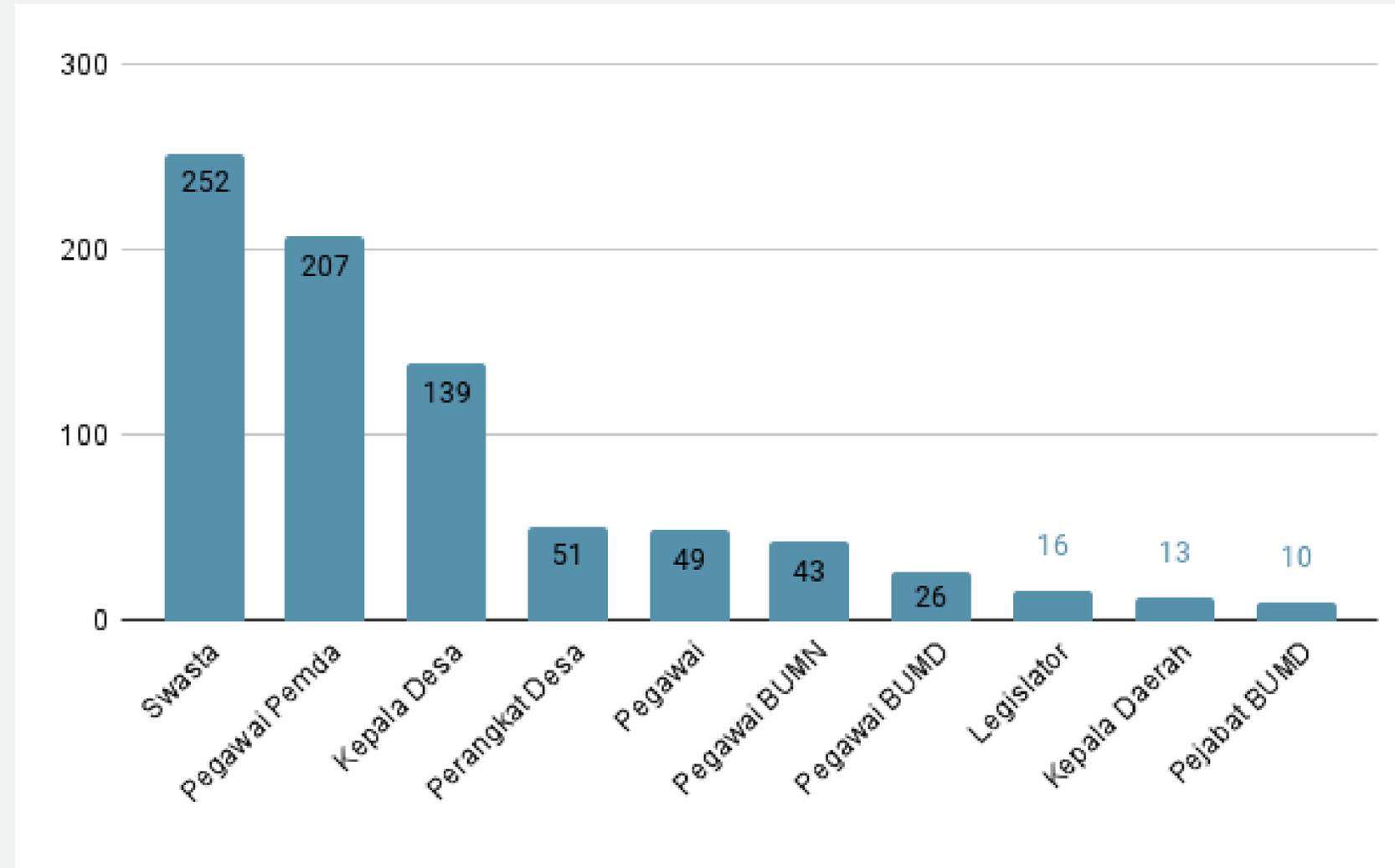
TREN VONIS 2023

Rata-Rata Usia Pelaku

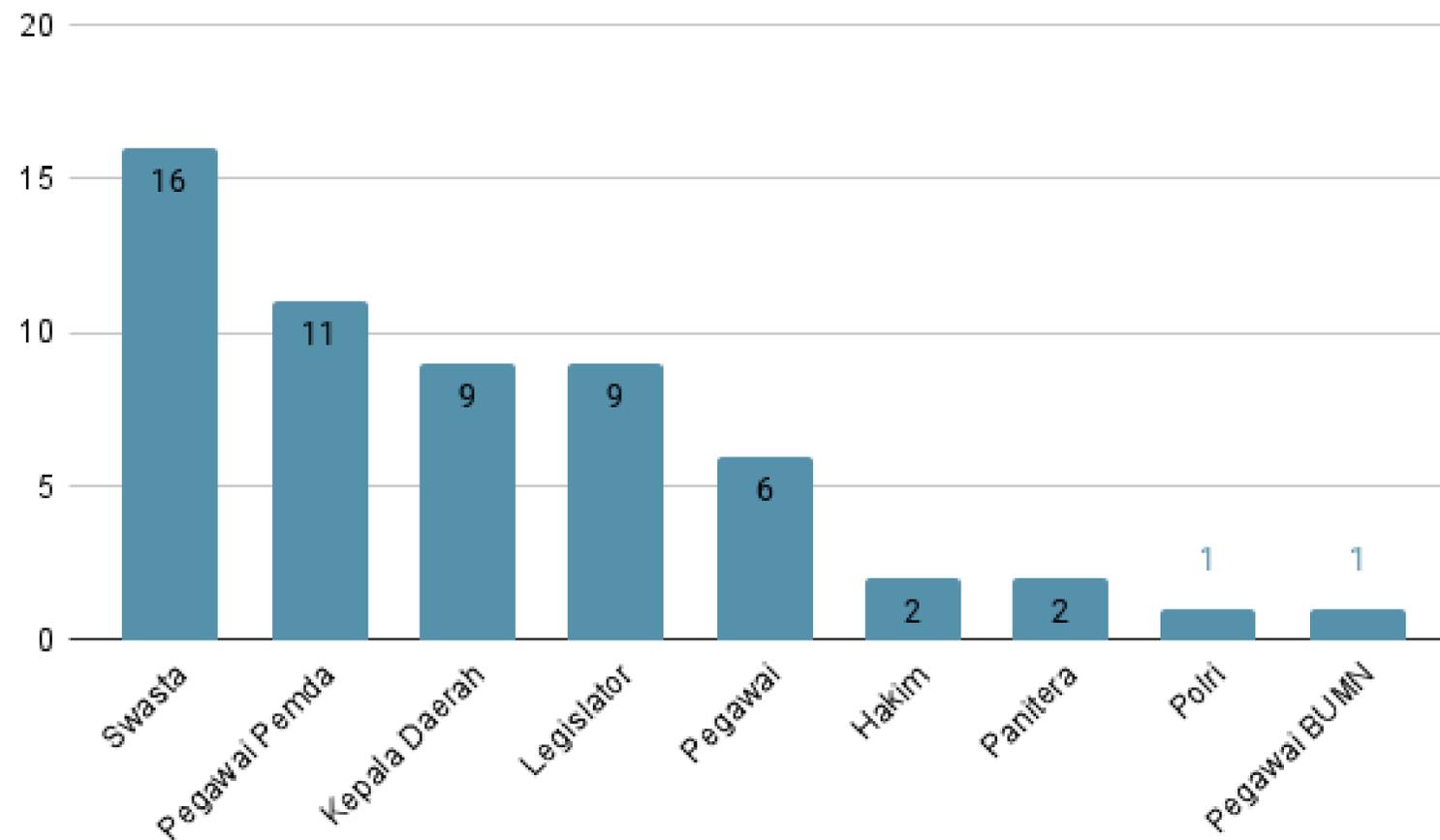


Pelaku paling muda berusia 22 tahun atas nama Rici Sadian Putra. Akibat perbuatannya, negara rugi Rp 389 juta. Sedangkan paling tua bernama Fazwar Bujang, 75 tahun, berprofesi sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2007-2012. Ia melakukan praktik korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun.

Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa

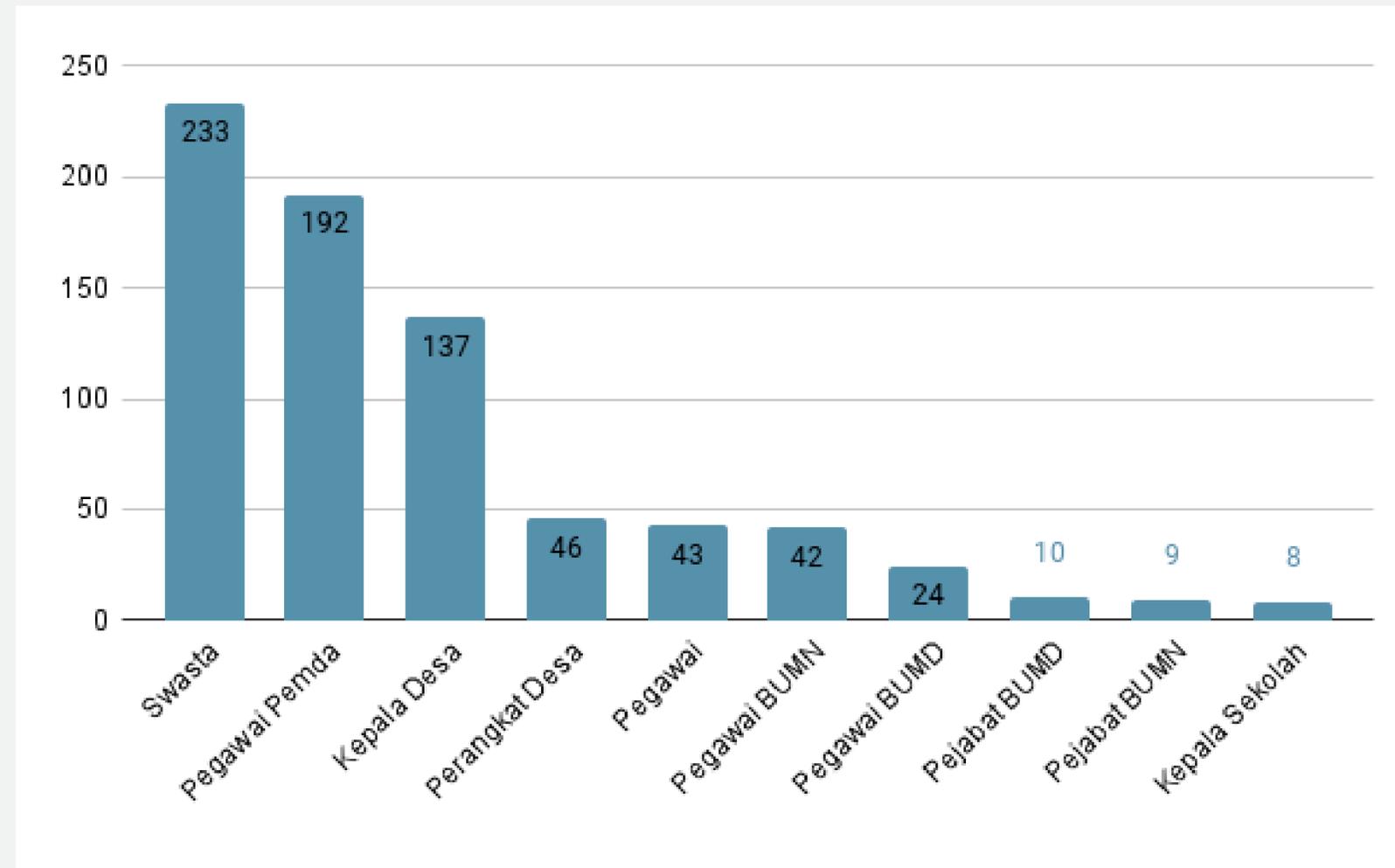


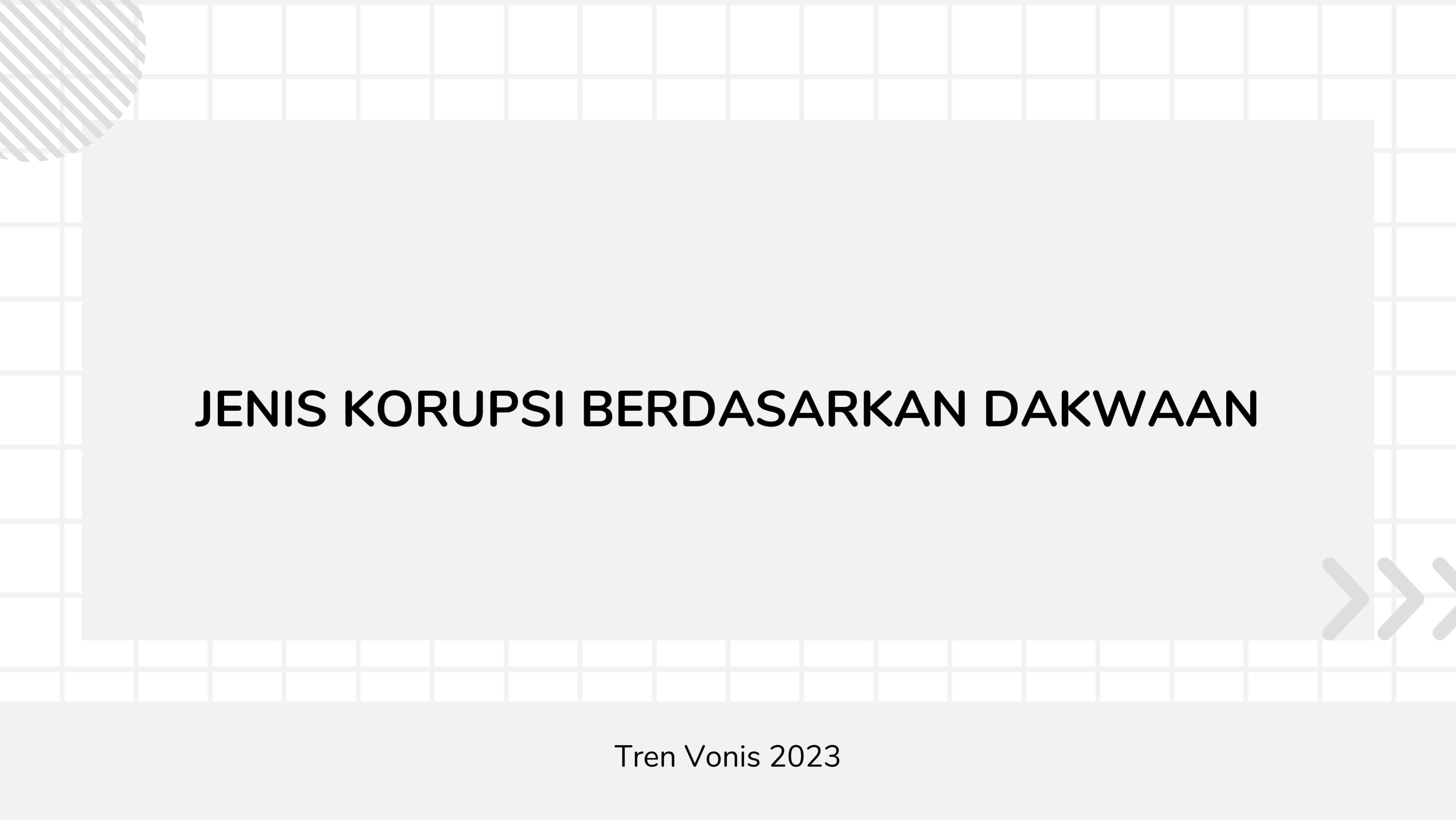
Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa



TREN VONIS 2023

Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa

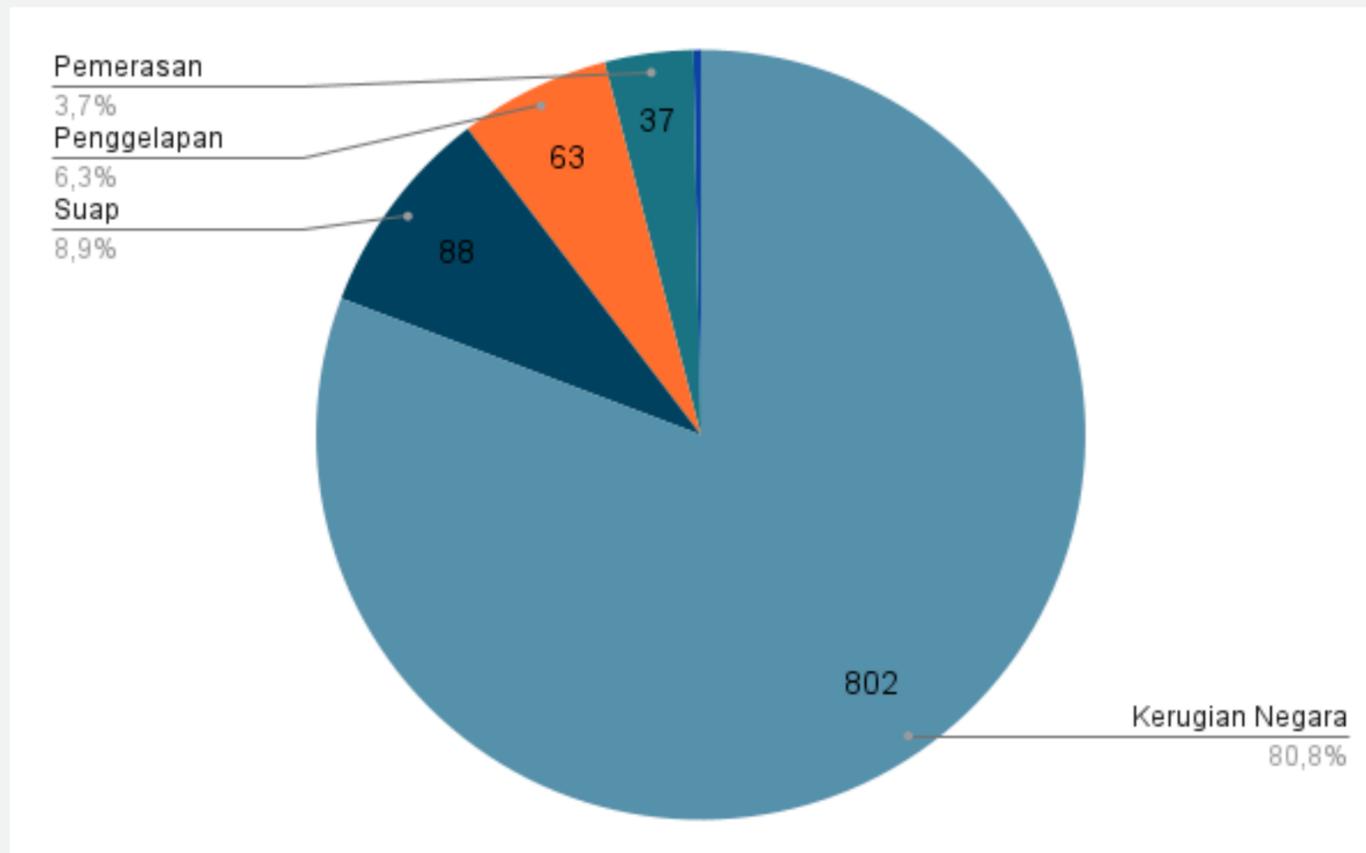




JENIS KORUPSI BERDASARKAN DAKWAAN

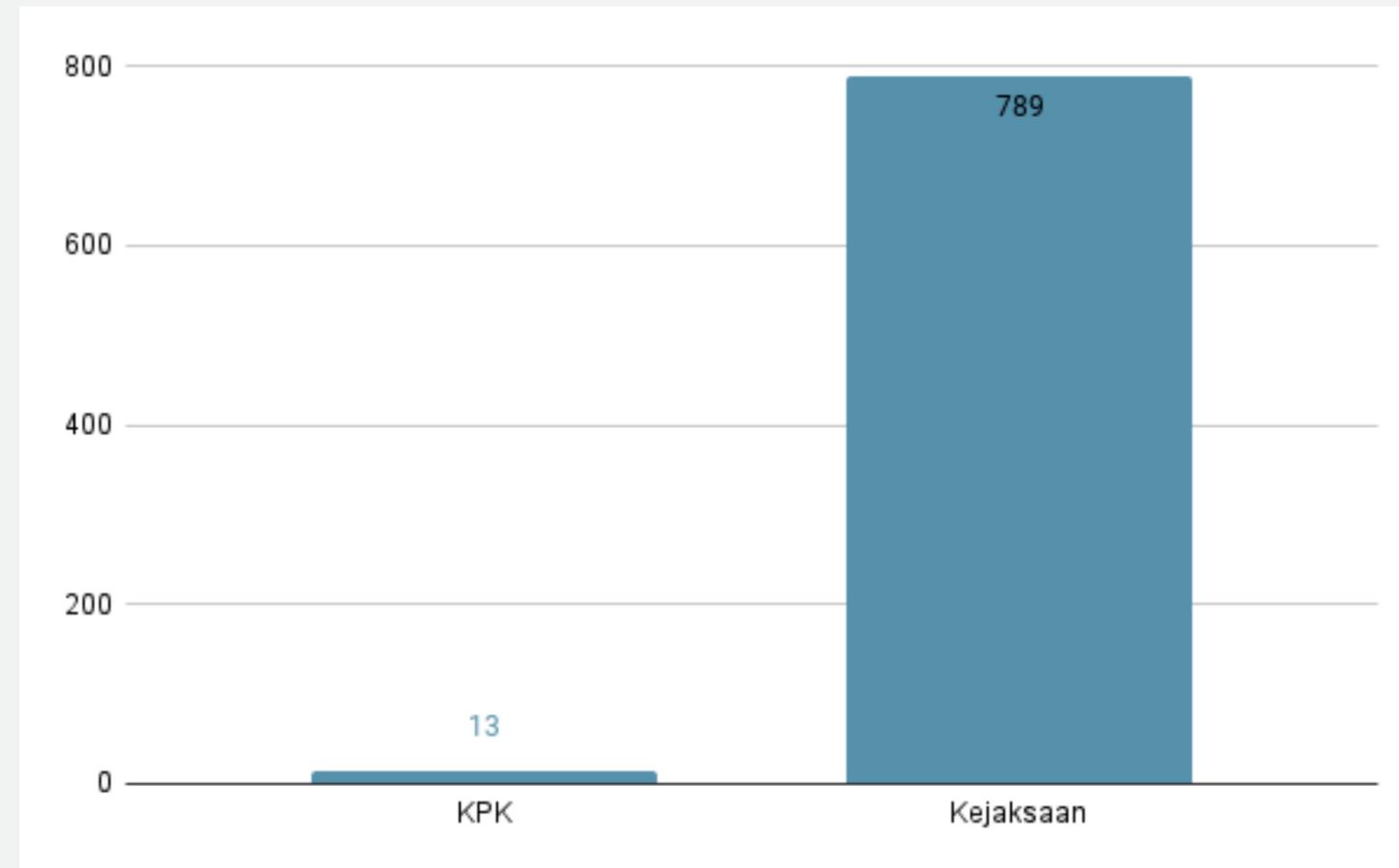
Tren Vonis 2023

Jenis Korupsi berdasarkan Dakwaan



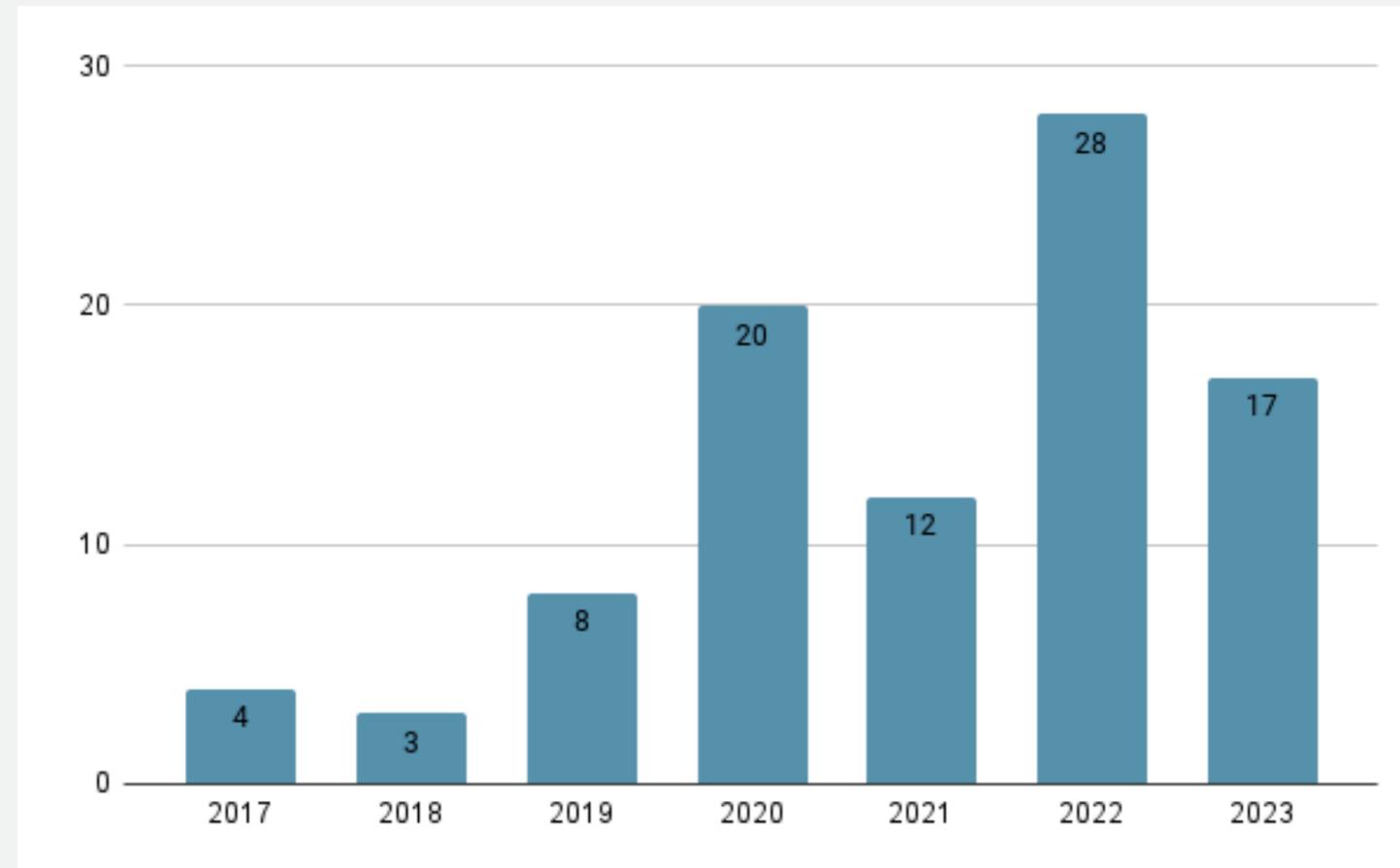
- Delik gratifikasi dikenakan kepada 19 terdakwa
- Obstruction of justice kepada 6 terdakwa
- Pencucian uang hanya dikenakan kepada 17 terdakwa

Dakwaan Kerugian Keuangan Negara



- Kejaksaan Agung jauh mengungguli KPK dalam memproses perkara dengan irisan kerugian negara
- KPK terpusat pada penanganan suap yang mestinya dapat membangun perkara melalui metode case building

Tren Dakwaan Pencucian Uang



- Kejaksaan jauh mendominasi pengusutan perkara korupsi dengan dimensi pencucian uang. KPK hanya mendakwa 5 terdakwa.
- Pengenaan delik pelaku pencucian uang pasif juga minim dijerat oleh penegak hukum

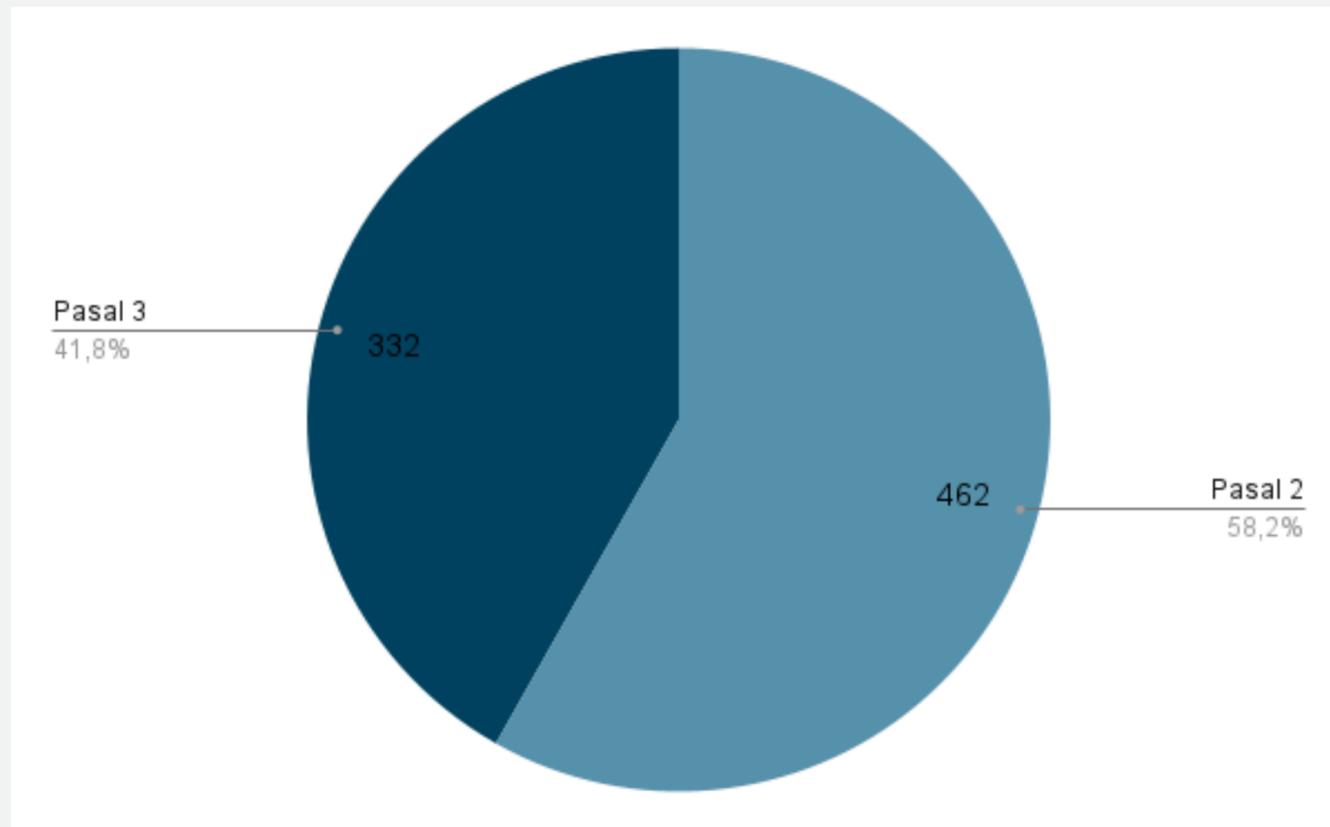
TREN VONIS 2023



PEMETAAN TUNTUTAN

Tren Vonis 2023

Delik Kerugian Negara dalam Tuntutan

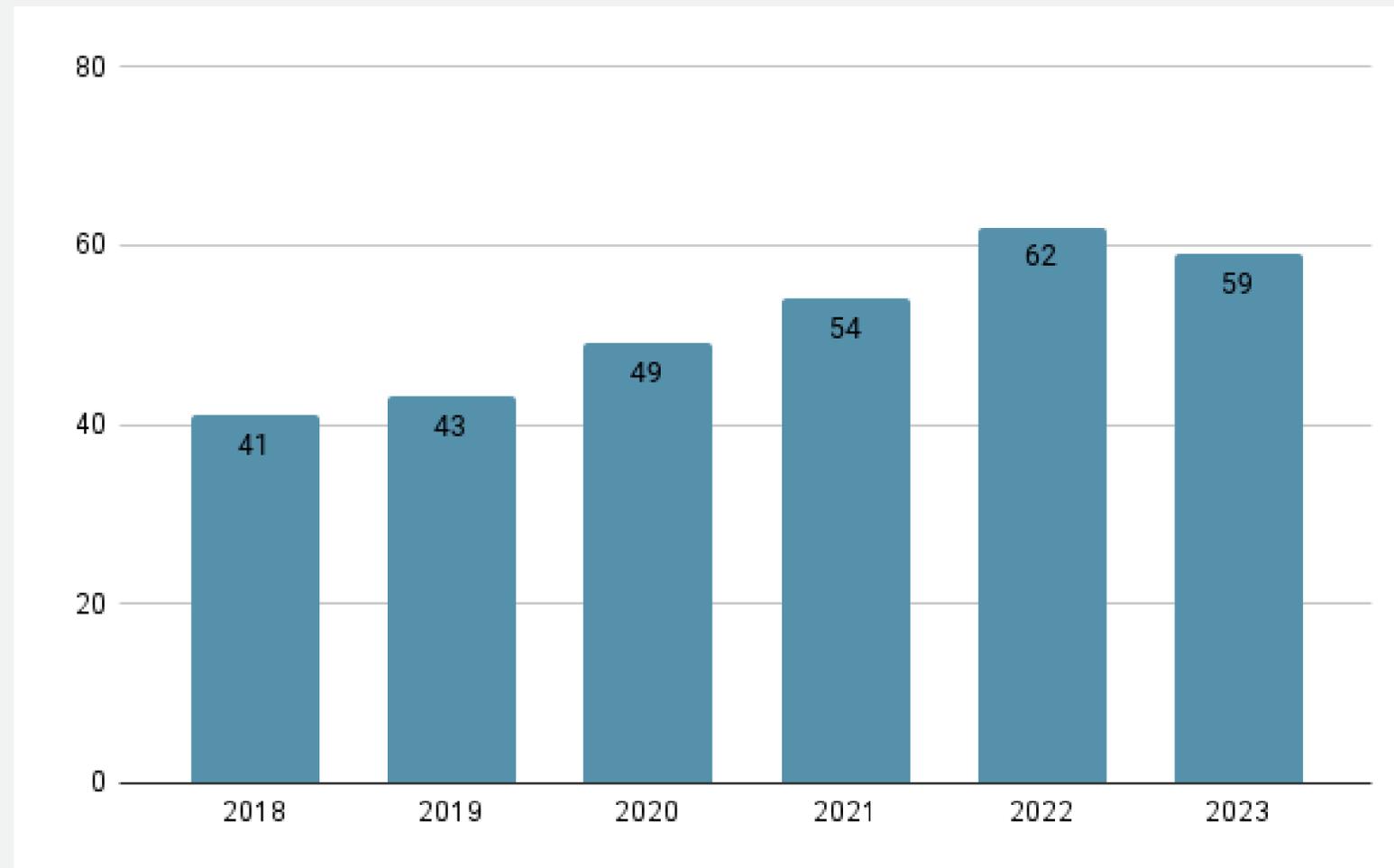


- Mayoritas menggunakan Pasal 2 ketimbang Pasal 3 patut diapresiasi.
- Tuntutan pencucian uang masih sama dengan dakwaan, yakni, 17 orang.

Rata-Rata Tuntutan Penjara

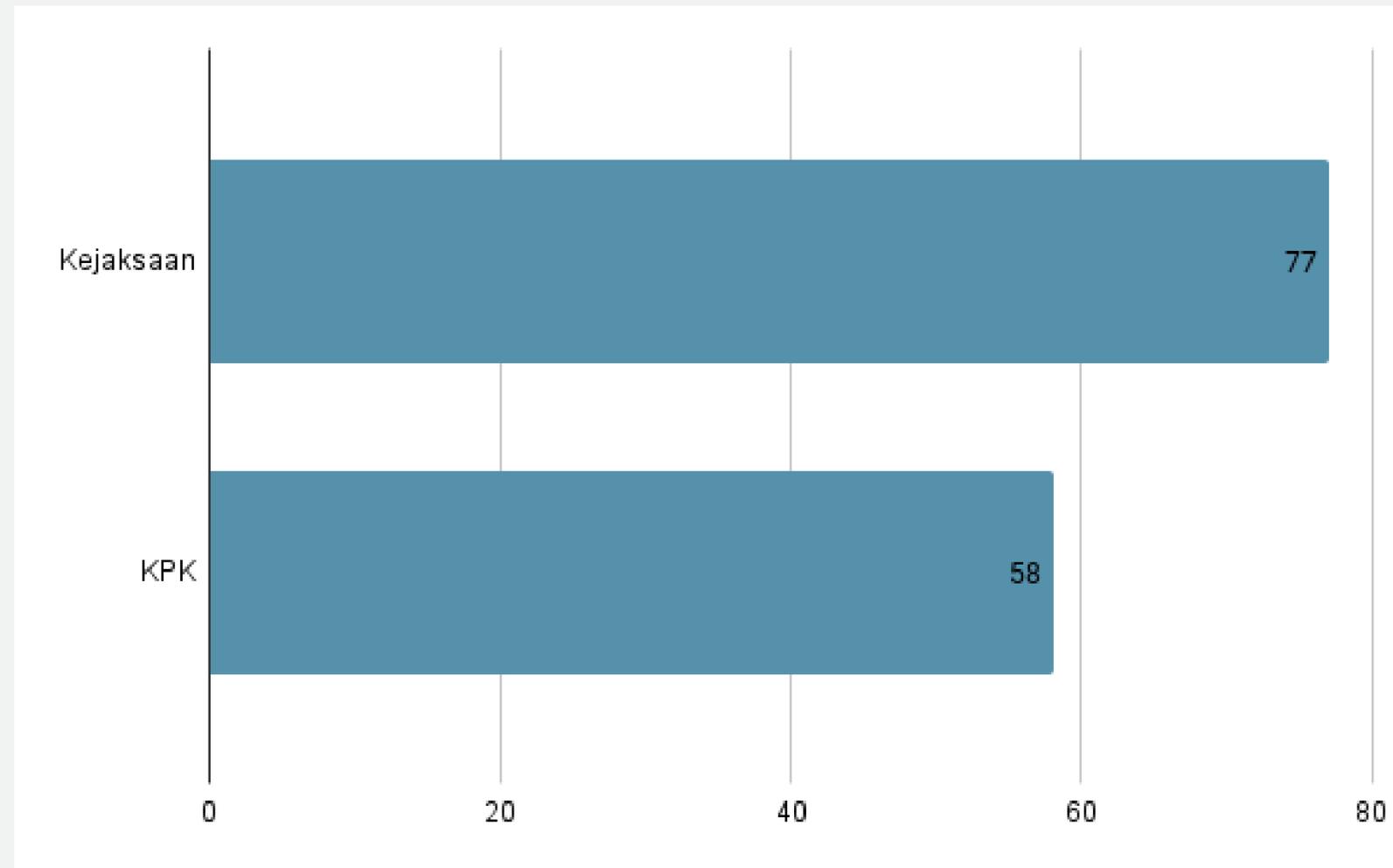
Rata-rata tuntutan sepanjang tahun 2023 adalah 4 tahun 11 bulan penjara

Tren Tuntutan setiap Tahun



TREN VONIS 2023

Tuntutan berdasarkan Penuntut Umum



TREN VONIS 2023

Rata-Rata Tuntutan Denda

Rata-rata tuntutan denda setiap terdakwa sebesar Rp 236.297.312

Rata-Rata Tuntutan Pidana Penjara Pengganti

Rata-rata penjatuhan tuntutan pidana penjara pengganti adalah 2 tahun 2 bulan penjara

Rata-Rata Tuntutan berdasarkan Pekerjaan

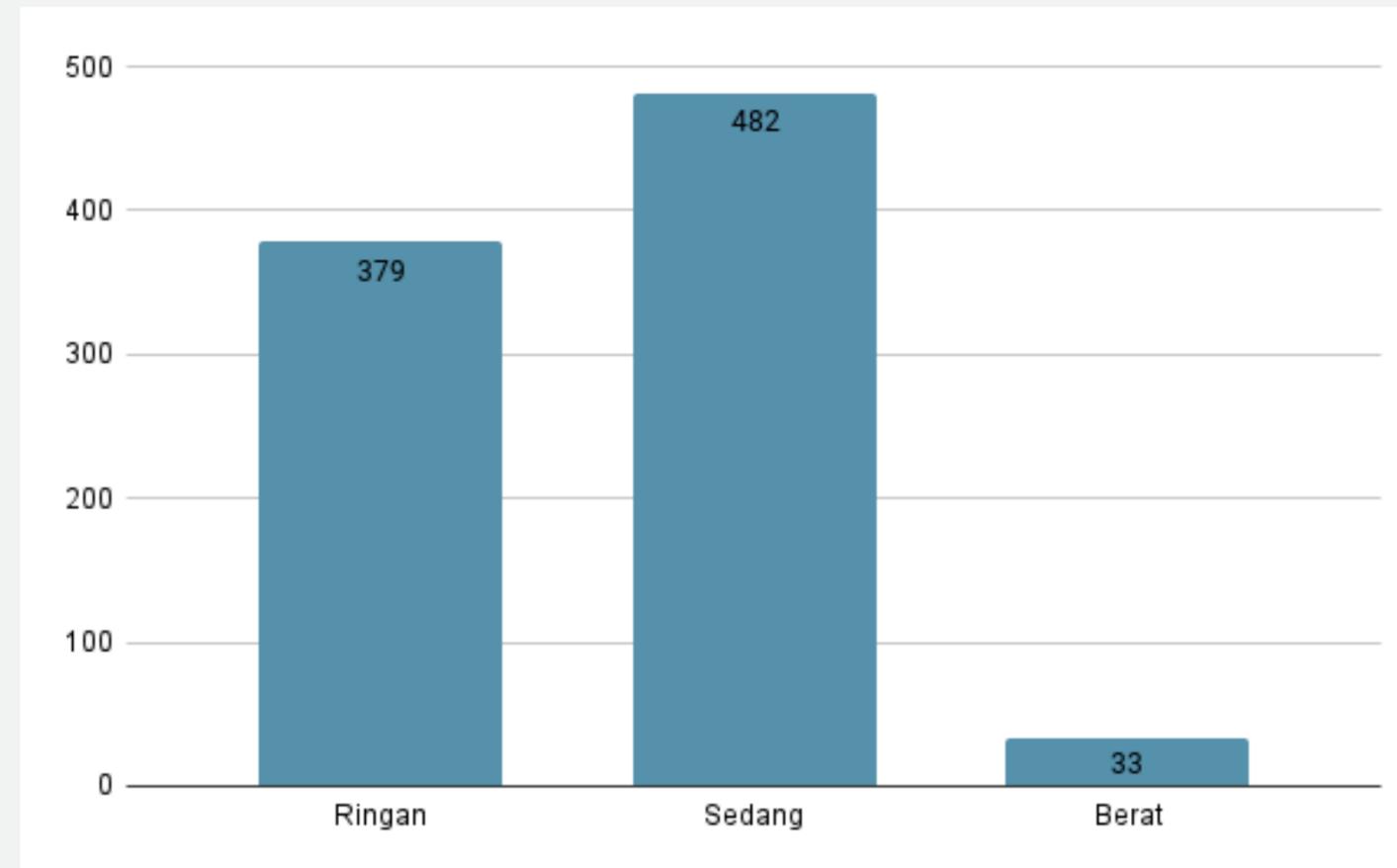


6 tahun 1 bulan penjara
Politisi



4 tahun 7 bulan penjara
Aparatur Sipil Negara

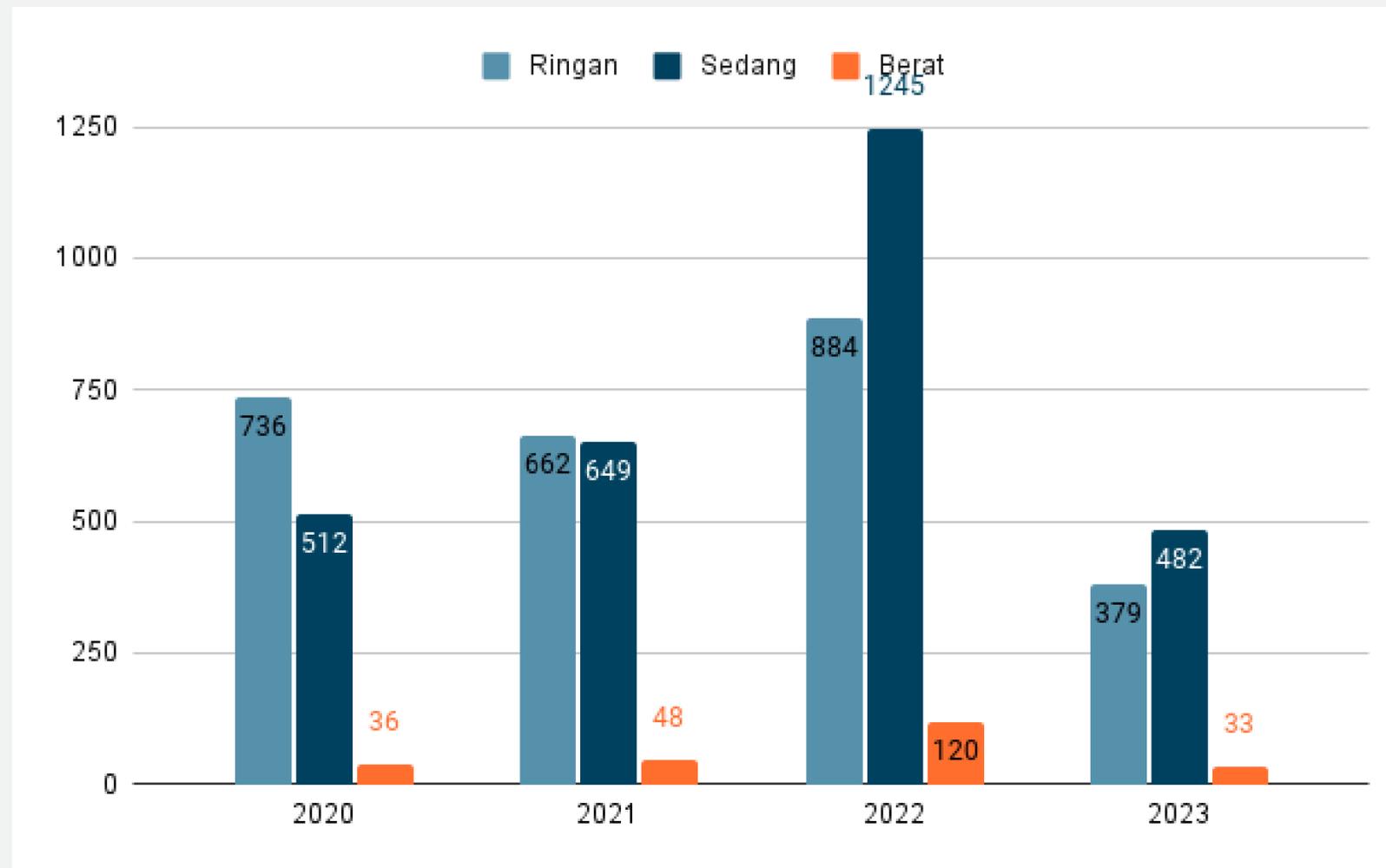
Berat Ringan Tuntutan



Ringan (0-4 tahun), Sedang (di bawah 10 tahun), Berat (di atas 10 tahun)

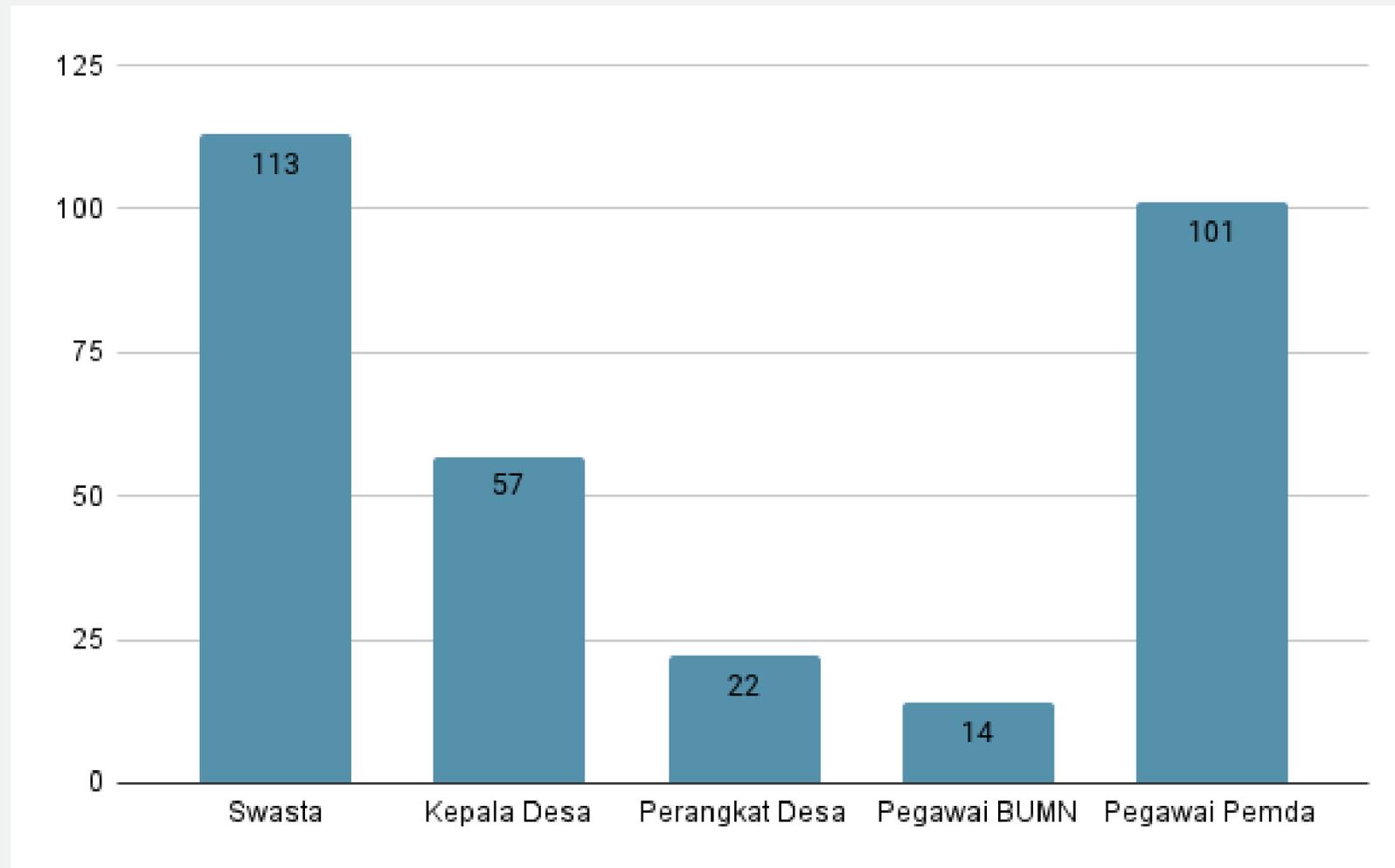
TREN VONIS 2023

Tren Berat Ringan Tuntutan



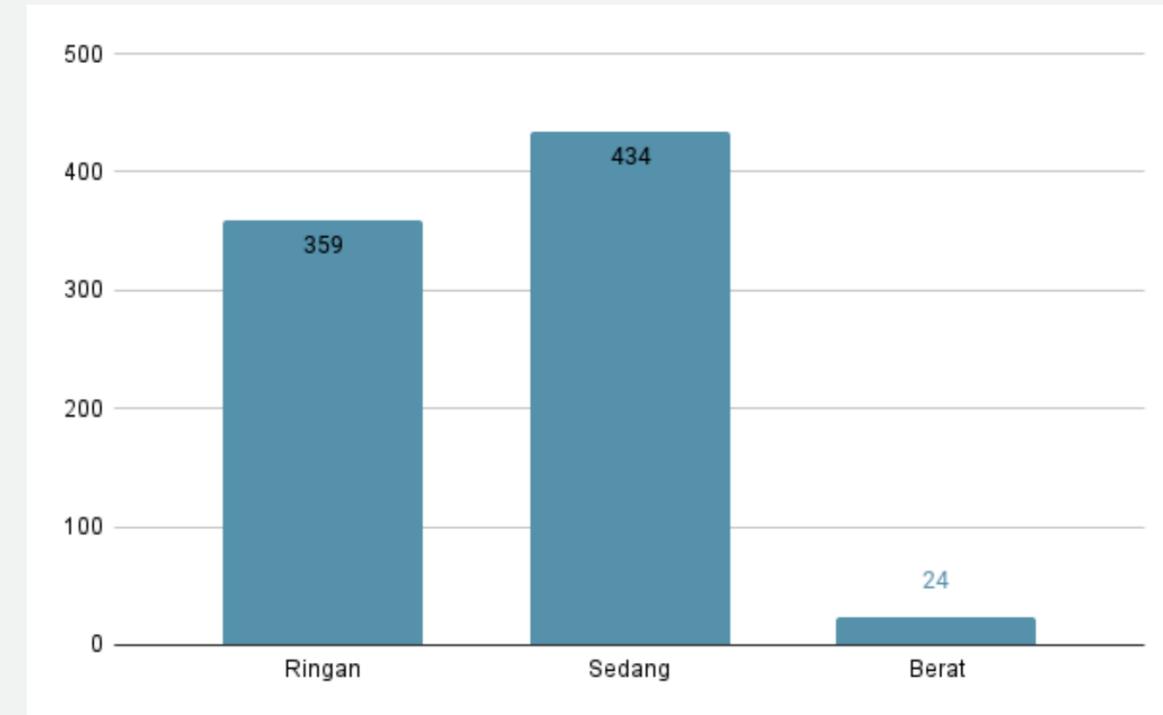
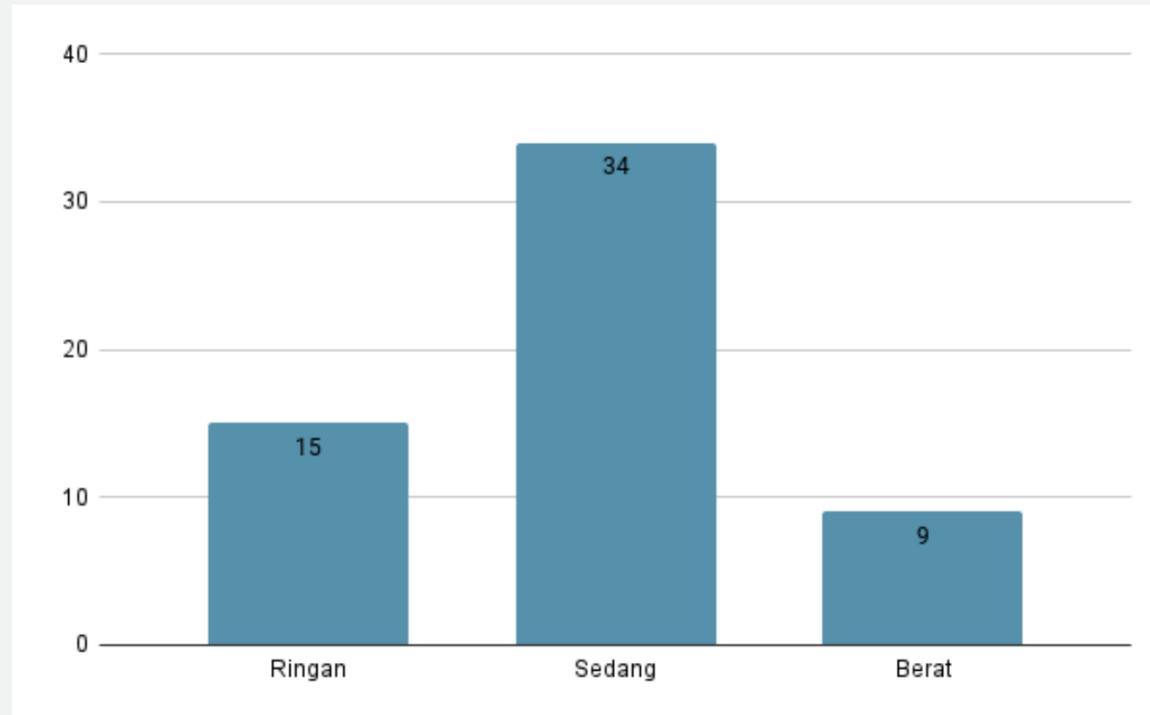
TREN VONIS 2023

Tuntutan Ringan - Pekerjaan Pelaku



Pemberatan melalui Pasal 52 KUHP tidak pernah digunakan

Pemetaan Tuntutan - Penuntut Umum

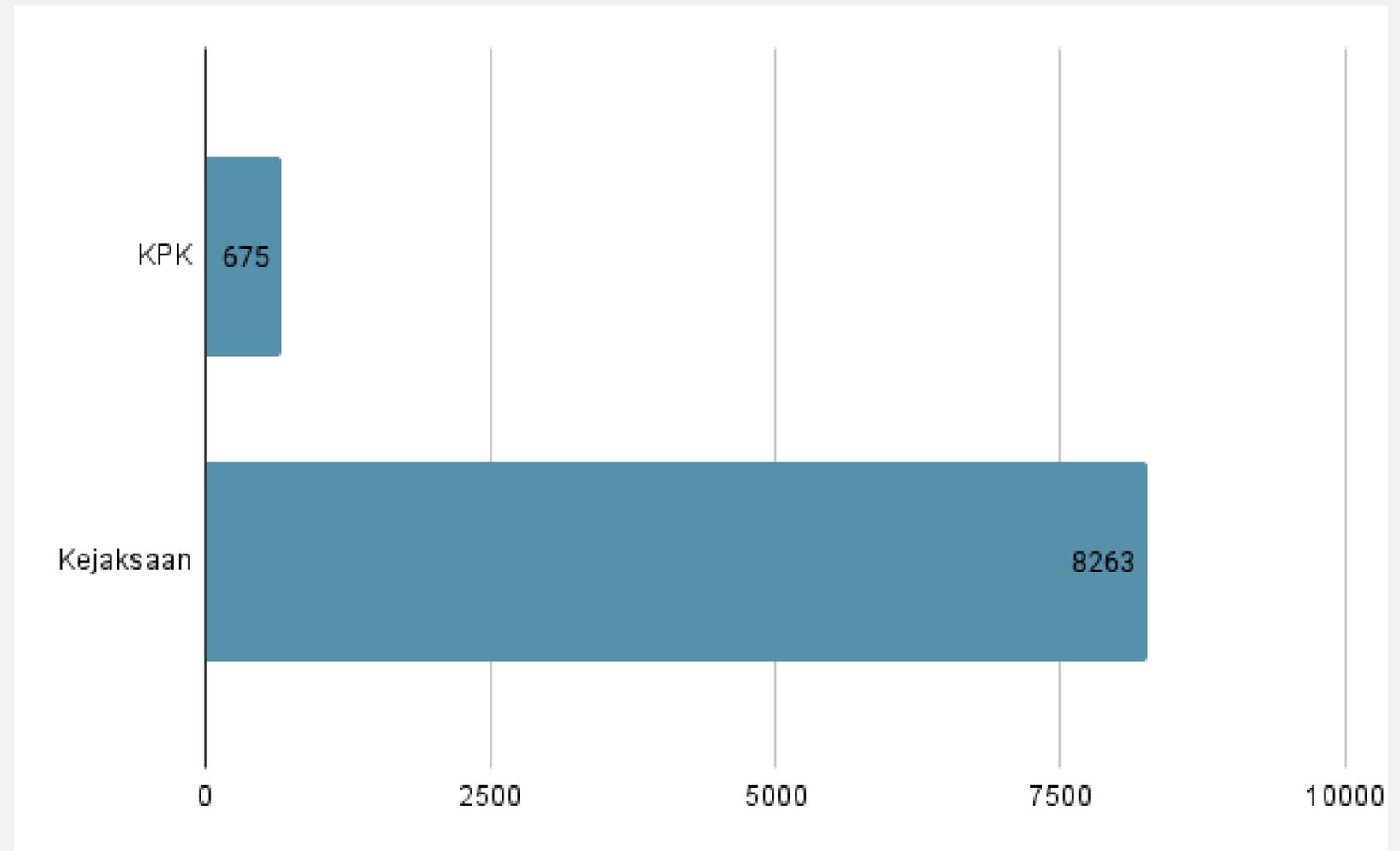


TREN VONIS 2023

Tuntutan Uang Pengganti

Tuntutan uang pengganti sepanjang tahun 2023 adalah Rp 83.345.307.640.677

Tuntutan Uang Pengganti - Penuntut Umum



TREN VONIS 2023

Tuntutan Uang Pengganti - Kejaksaan

| No | No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan Terdakwa | Penuntut Umum | Uang Pengganti |
|----|-----------------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------|
| 1 | 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst | Stanley MA | Senior Manager Permata Hijau Group | Kejaksaan Agung | Rp 868 M |
| 2 | 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst | Benny Tjokrosaputro | Komisaris PT. Hanson International Tbk | Kejaksaan Agung | Rp 5,7 T |
| 3 | 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst | Surya Darmadi | Pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari dan PT Palma | Kejaksaan Agung | Rp 73 T |

Tuntutan Uang Pengganti - KPK

| No | No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan Terdakwa | Penuntut Umum | Uang Pengganti |
|----|--------------------------------|-------------------|---|---------------|----------------|
| 1 | 51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst | Bambang Kayun | Kasubag Penerapan Pidana dan HAM Divisi Hukum Polri | KPK | Rp 57,1 M |
| 2 | 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg | Stevanus Kusnadi | Direktur Utama PT Pancamulti Niaga | KPK | Rp 84,2 M |
| 3 | 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst | John Irfan Kenway | Direktur PT Diratama Jaya Mandiri | KPK | Rp 177 M |

Disparitas Tuntutan Penjara - Kerugian Negara

| No | No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Tuntutan | Kerugian Negara | Pasal |
|----|-----------------------------|-----------------------|---|-----------|-----------------|---------|
| 1 | 7/pid.sus-tpk/2023/Pn Bjm | M Firman Jauhari | Konsultan Pengawas CV Mandiri Cipta Pratama | 4 tahun | Rp 1,6 M | Pasal 2 |
| 2 | 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg | Rendra Zegita | Buruh | 6 tahun | Rp 500 juta | Pasal 2 |
| 3 | 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg | Kurniawan | Kepala Desa Karyasari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut | 4 tahun | Rp 161 juta | Pasal 2 |
| 4 | 16/PID.SUS-TPK/2023/PN PBR | Harianto | Kepala Desa Senderak | 4 tahun | Rp 4,2 M | Pasal 2 |
| 5 | 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps | Sri Wahyuni | Swasta | 1,5 tahun | Rp 4,8 M | Pasal 3 |
| 6 | 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna | Teuku Husaini | Direktur BUMG Bahtera Maju Krueng Raya | 2 tahun | Rp 87 juta | Pasal 3 |
| 7 | 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg | Mila Karmila | Manager Operasional pada CV Citra Sarana Grafika (CV CSG) | 1,5 tahun | Rp 19,7 M | Pasal 3 |
| 8 | 10/PID.SUS-TPK/2023/PN PBR | Nathanael Simanjuntak | Direktur PT. Multi Karya Pratama | 2 tahun | Rp 1,4 M | Pasal 3 |

TREN VONIS 2023

Disparitas Tuntutan Penjara - Suap

| No | No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Tuntutan | Suap | Pasal |
|----|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 1 | 71/PID.SUS-TPK/2022/PN SRG | Suhendi | Sekretaris Desa Cikupa | 2 tahun | Rp 24,6 juta | Pasal 11 |
| 2 | 56/pid.sus-tpk/2022 Pn Pal | Michael Andersen Tampoma | PNS di BPN Kota Palu | 3 tahun | Rp 5 juta | Pasal 11 |
| 3 | 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg | Mukti Agung Wibowo | Bupati Pemalang 2021 - 2026 | 8,5 tahun | Rp 6,6 M | Pasal 12 |
| 4 | 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby | R. Abdul Latif Amin Imron | Bupati Bangkalan 2018-2023 | 9 tahun 4 bulan | Rp 575 juta | Pasal 12 |
| 5 | 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst | LM. Rusdianto Emba | Wiraswasta | 3 tahun 6 bulan | Rp 3,4 M | Pasal 5 ayat (1) |
| 6 | 108/PID.SUS-TPK/2022/PN MKS | Jusieandra Pribadi Pampang | Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa | 3 tahun 6 bulan | Rp 48,3 M | Pasal 5 ayat (1) |

TREN VONIS 2023

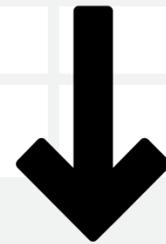
Langkah Penegak Hukum terkait Disparitas

Kejaksaan Agung lebih dulu menerbitkan aturan tentang pedoman penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemantauan, Kejaksaan telah menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung tahun 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Korupsi.

Sedangkan KPK, aturan itu belum dapat ditemukan, sekalipun sejak tahun 2021, mereka mengatakan bahwa pedoman penuntutan sedang dalam difinalisasi. Sebagai lembaga utama pemberantas korupsi, KPK lambat dalam melihat maraknya fenomena disparitas tuntutan di persidangan.

Kejaksaan telah pula memperbarui pedoman tuntutannya tahun 2019. Pembaruan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Perkara Korupsi.

CATATAN ATURAN DISPARITAS KEJAKSAAN



KORUPSI LAIN

Disparitas tidak hanya terjadi terkait korupsi kerugian keuangan negara, melainkan juga pada jenis korupsi lain.



PEKERJAAN PELAKU

Pekerjaan pelaku, misalnya sebagai pejabat publik, penegak hukum, atau politisi harus jadi alasan pemberat.

Disparitas Tuntutan Denda

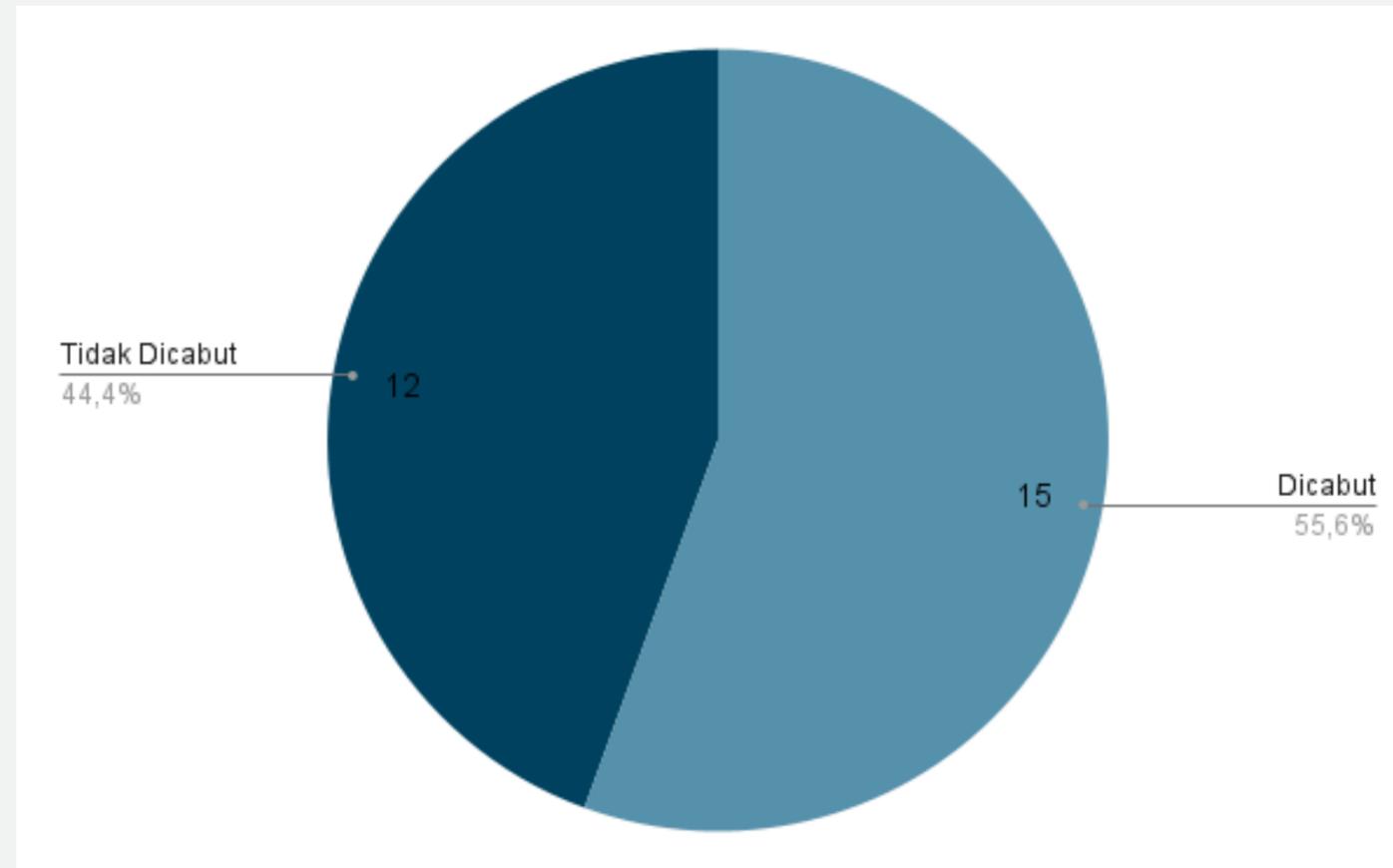
| No | No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Kerugian Negara | Denda | Pasal |
|----|----------------------------|----------------|---|-----------------|------------|------------------|
| 1 | 16/PID.SUS-TPK/2023/PN PBR | Harianto | Kepala Desa Senderak | Rp 4,2 M | Rp 50 juta | Pasal 2 ayat (1) |
| 2 | 11/PID.SUS-TPK/2023/PN MKS | Alexander Aman | Mantan Kepala Desa Lembang Butang Kab Tana Toraja 2013 - 2019 | Rp 364 juta | Rp 50 juta | Pasal 2 ayat (1) |
| 3 | 20/pid.sus-tpk/2023 Pn PTK | Razali Bustam | Direktur PT Malabar Mandiri | Rp 2,1 M | Rp 50 juta | Pasal 3 |
| 4 | 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg | Abdul Mukti | Direktur CV. Hutama Mukti | Rp 20 juta | Rp 50 juta | Pasal 3 |
| 5 | 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby | Suwaji | Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Tim Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial | Rp 36 juta | Rp 50 juta | Pasal 11 |
| 6 | 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN-Sby | Cariadi | Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Desa Tambaksari | Rp 420 juta | Rp 50 juta | Pasal 11 |

TREN VONIS 2023

Disparitas Tuntutan Pidana Penjara Pengganti

| No | No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Uang Pengganti | Pidana Penjara Pengganti | Pasal |
|----|--------------------------------|-------------------------|--|----------------|--------------------------|------------------|
| 1 | No. 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby | Nurkholis | Kepala Desa Ngulan Wetan | Rp 50 juta | 2 tahun | Pasal 2 ayat (1) |
| 2 | 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst | Budi Suchaeri | Direktur PT Carita Boat Indonesia | Rp 11,8 M | 1 tahun | Pasal 2 ayat (1) |
| 3 | 116/PID.SUS-TPK/2022/PN MKS | Azwar Anas Singer | Direktur PT Teknik Eksakta | Rp 28 juta | 1 tahun | Pasal 3 |
| 4 | 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst | Taufik Hendra Kusuma | Direktur Keuangan PT Waskita Karya | Rp 5,6 M | 1 tahun | Pasal 3 |
| 5 | 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby | Suwaji | Tim Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial | Rp 36,4 juta | 1 tahun | Pasal 11 |
| 6 | 56/pid.sus-tpk/2022 Pn Pal | Michal Andersen Tampoma | PNS BPN Kota Palu | Rp 551 juta | 1 tahun | Pasal 11 |

Tuntutan Pencabutan Hak Tertentu



Seluruh tuntutan pencabutan hak politik dituntut oleh KPK

Tuntutan Bermasalah

| No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Kerugian Negara/Suap | Pasal Tuntutan | Tuntutan | Penuntut Umum |
|-----------------------------|---------------|--|----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg | Ilyas Sabli | Bupati Natuna Periode 2011-2016 | Rp 7,7 M | Pasal 2 ayat (1) | 4 tahun | Kejaksaan |
| 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi | Tamrin Tamin | Pejabat Direktur PDAM Buton Selatan | Rp 4,2 M | Pasal 3 | 1,5 tahun | Kejaksaan |
| 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg | Sodik Ismanto | Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang | Rp 100 juta | Pasal 5 | 1,5 tahun | KPK |
| 174/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby | Adib Makarim | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung | Rp 140 juta | Pasal 12 | 4 tahun | KPK |

Latar belakang pekerjaan tak dijadikan alasan pemberat tuntutan

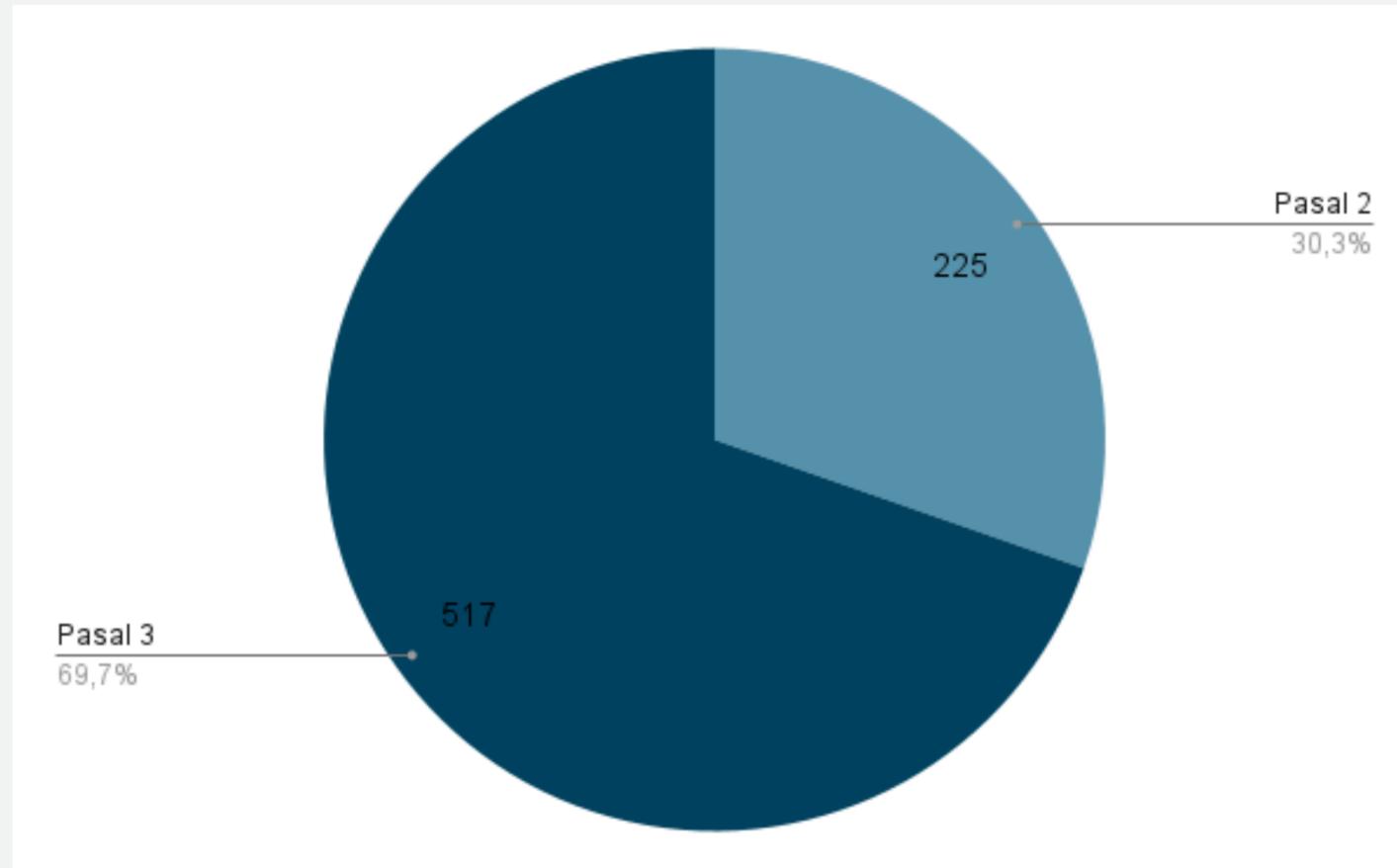
TREN VONIS 2023



PEMETAAN VONIS

Tren Vonis 2023

Vonis Pasal Kerugian Negara



Ada 214 terdakwa yang pasal pemidanaannya diubah dari tuntutan, di mana sebelumnya dikenakan Pasal 2 menjadi Pasal 3.

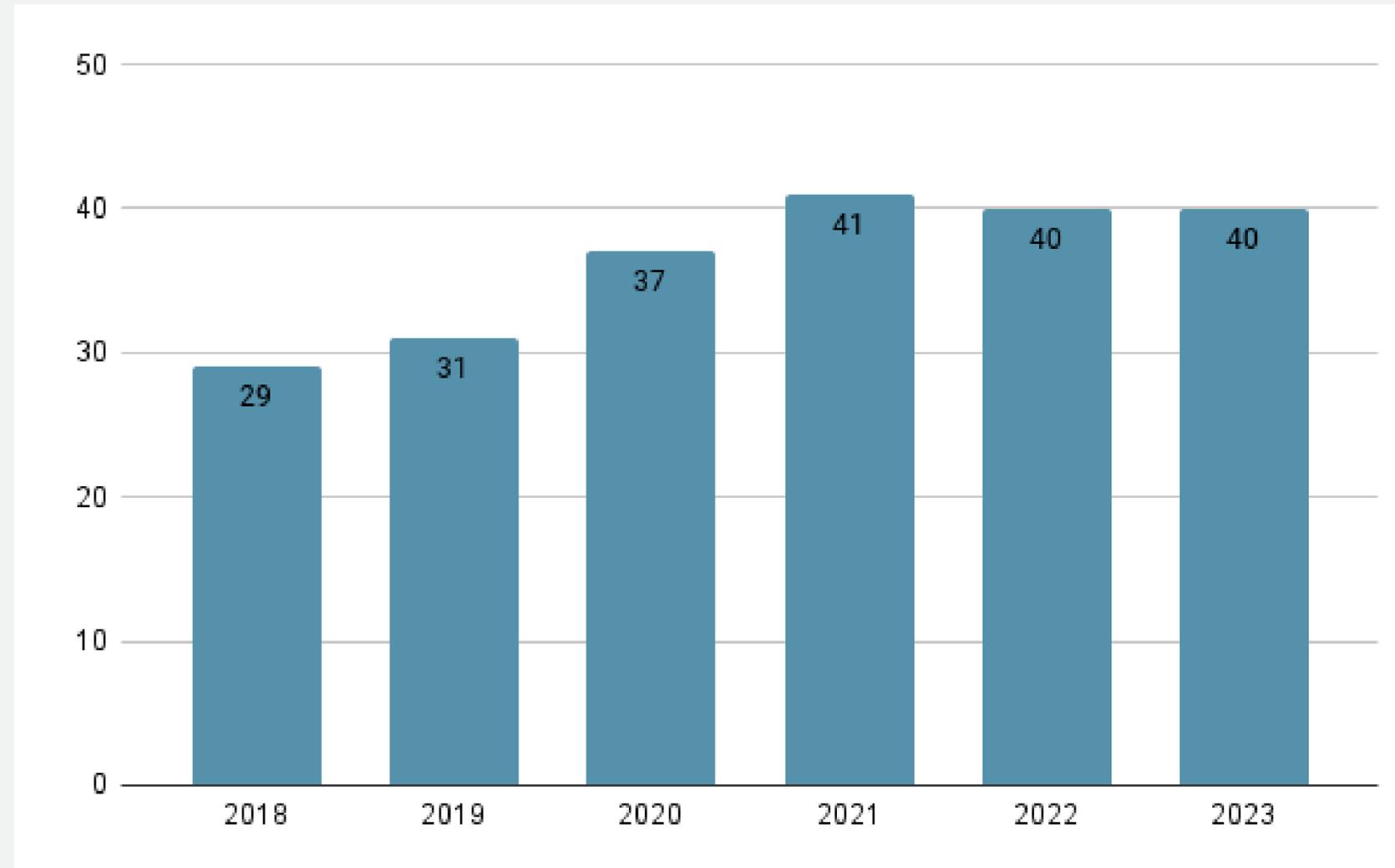
Vonis Pencucian Uang

Majelis hakim hanya mengenakan pasal pencucian uang kepada 13 terdakwa.
Artinya, ada 4 terdakwa yang tidak dikabulkan tuntutan penuntut umum.

Rata-Rata Hukuman Penjara

Rata-rata vonis penjara pada pemantauan persidangan perkara korupsi tahun 2023 adalah 3 tahun 4 bulan.

Tren Hukuman Penjara

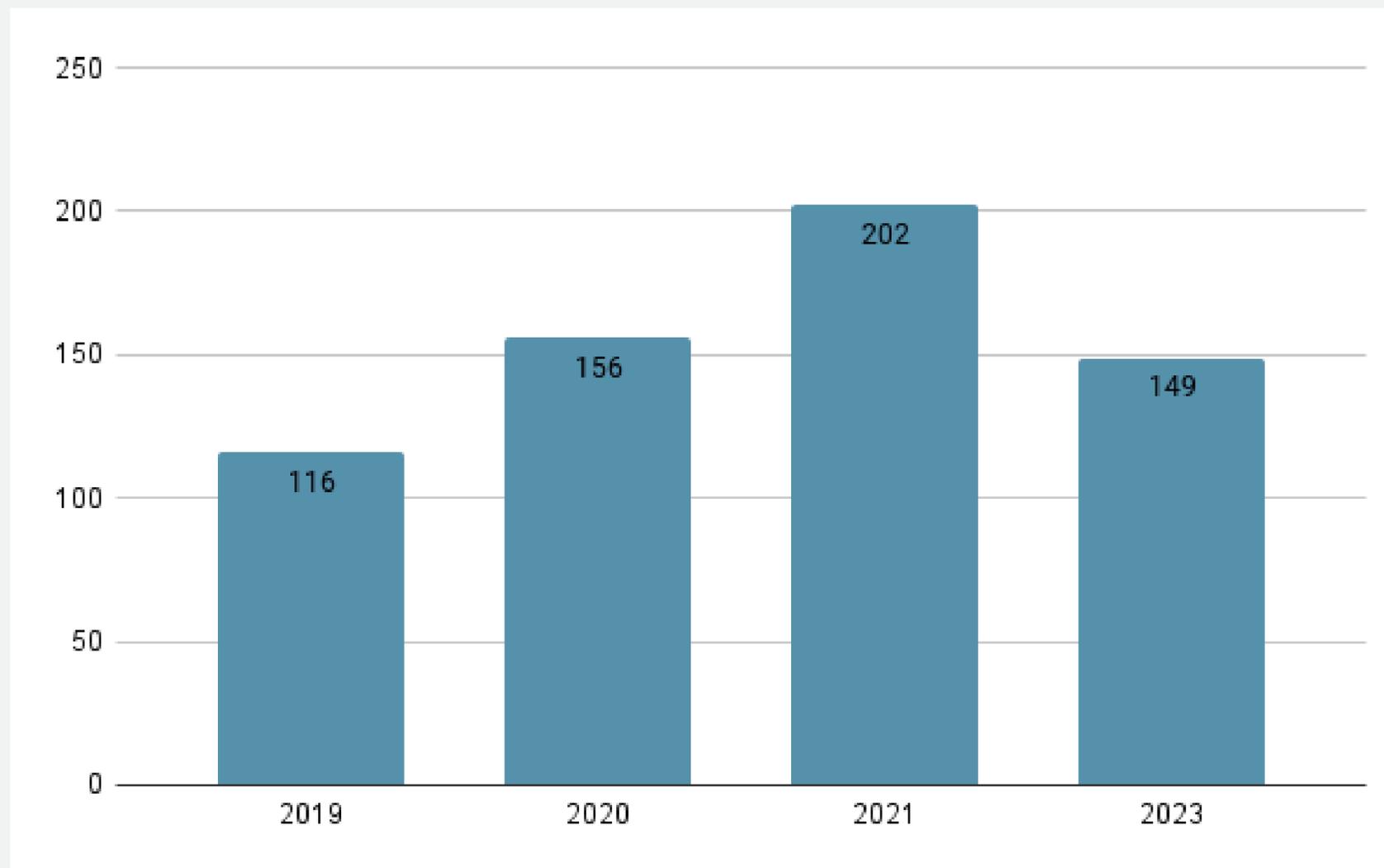


TREN VONIS 2023

Hukuman Denda

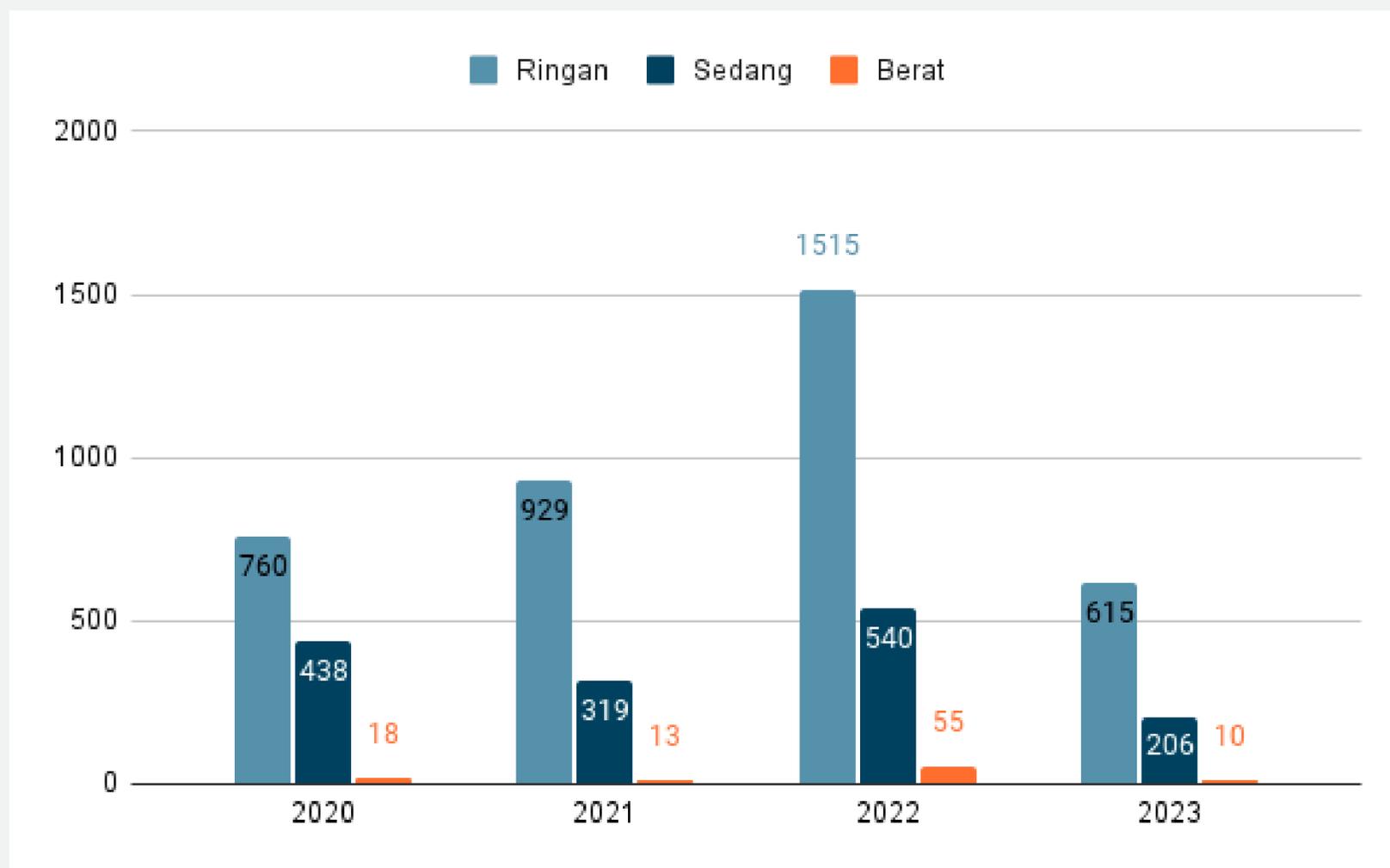
Total penjatuhan denda sebesar Rp 149.310.000.000.
Bila dirata-ratakan, maka pengenaan denda pada setiap terdakwa sebesar Rp 180 juta.

Tren Hukuman Denda (dalam miliar)



TREN VONIS 2023

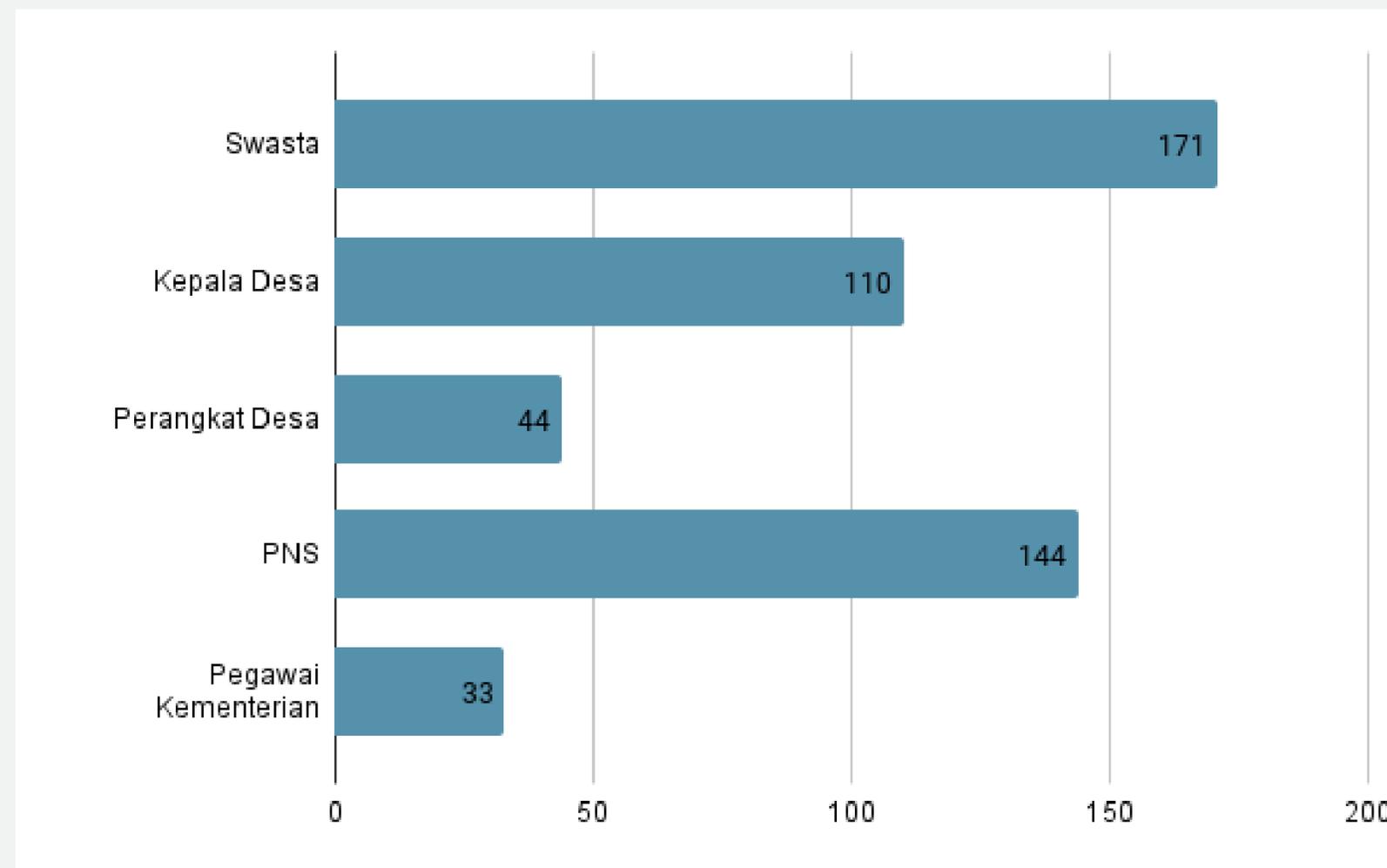
Tren Berat-Ringan Hukuman



- Ringan (0-4 tahun)
- Sedang (di atas 4 tahun)
- Berat (di atas 10 tahun)

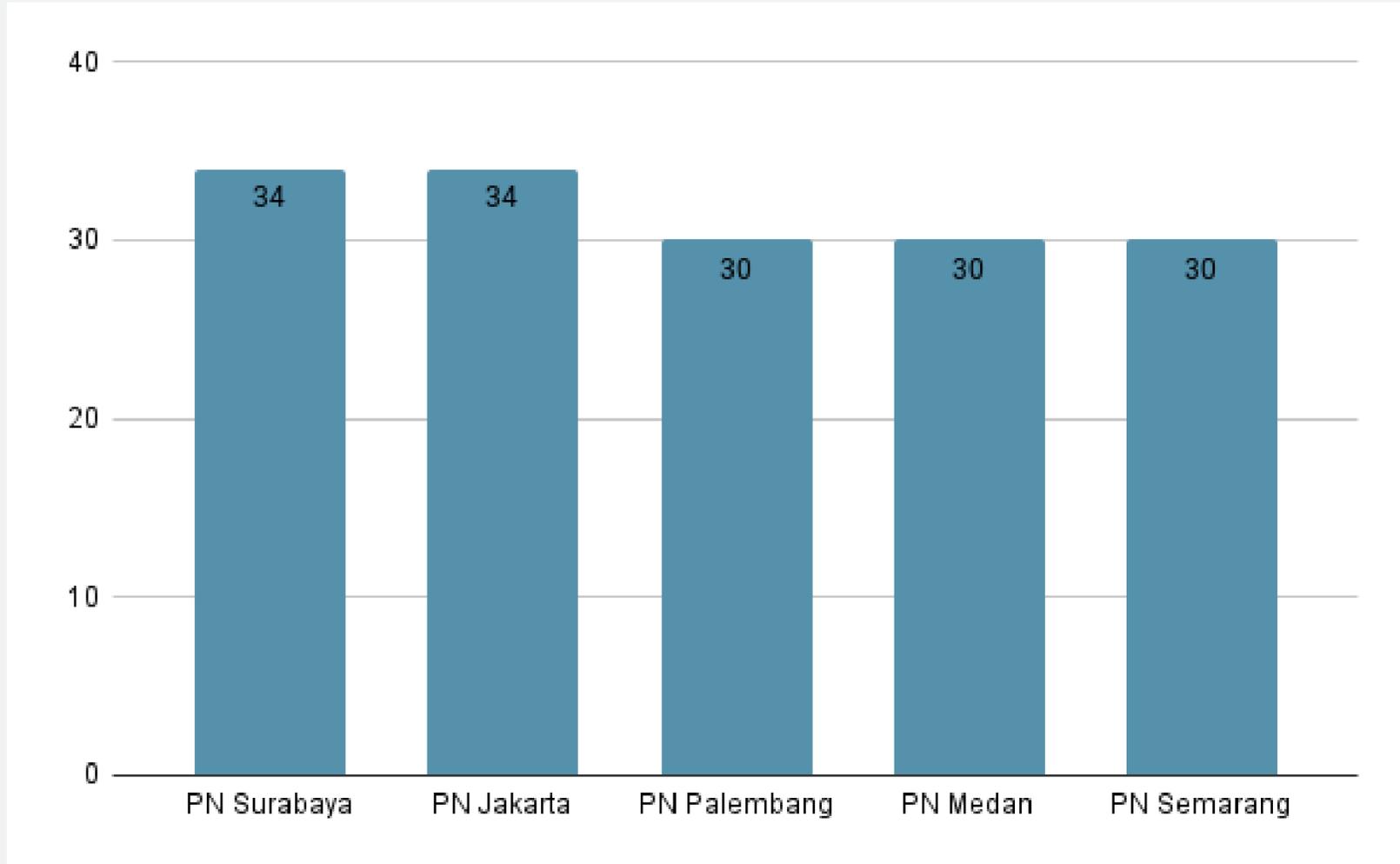
TREN VONIS 2023

Hukuman Ringan - Pekerjaan Terdakwa



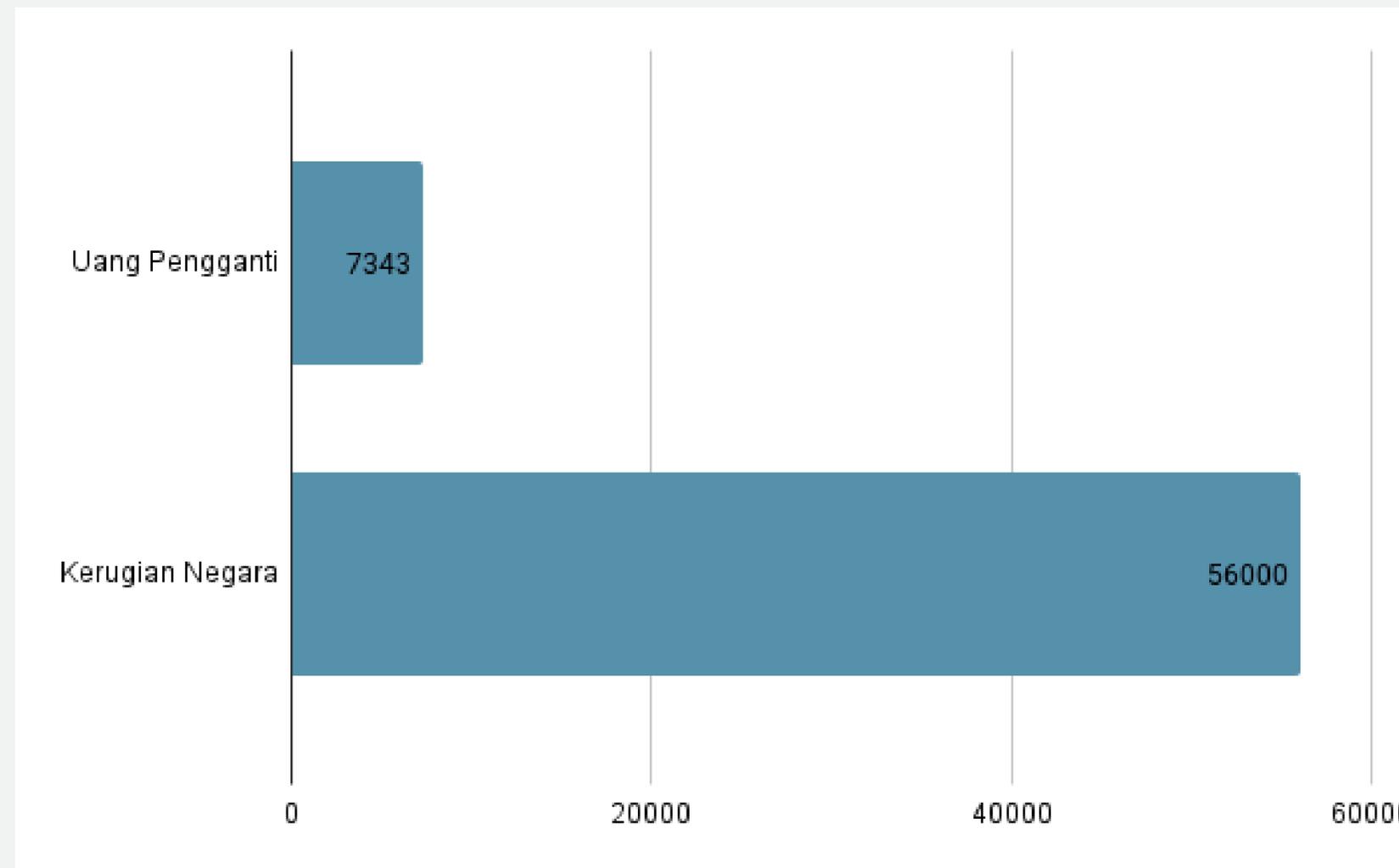
TREN VONIS 2023

Hukuman Ringan - Lokasi Pengadilan



TREN VONIS 2023

Hukuman Uang Pengganti - Kerugian Negara (dalam miliar)



TREN VONIS 2023

Vonis Uang Pengganti Tertinggi

| No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Vonis Uang Pengganti | Pengadilan |
|--------------------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------|
| 66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst | Bety | Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Danatama Sekuritas | Rp 43 M | PN Jakarta |
| 15/pid.sus-tpk/2023 pn jkt | PT Bangun Era Sejahtera | Korporasi | Rp 52 M | PN Jakarta |
| 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps | I Nyoman Agus Arya | Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Badung | Rp 56 M | PN Denpasar |
| 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg | Stevanus Kusnadi | Direktur Utama PT Pancamulti Niaga Pratama | Rp 84 M | PN Bandung |
| 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst | Benny Tjokrosaputro | Komisaris PT. Hanson International Tbk | Rp 5,7 T | PN Jakarta |

TREN VONIS 2023

Tuntutan Uang Pengganti Tak Dikabulkan

| No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Tuntutan Uang Pengganti | Pengadilan |
|--------------------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------|
| 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg | Alfonsius Makur | Kepala Perwakilan PT. Arison Karya Sejahtera | Rp 35 M | PN Kupang |
| 51/PID.SUS-TPK/2022/PN PBR | Dewi Farni Dja'far | Notaris | Rp 37 M | PN Pekanbaru |
| 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap | Johannes Rettob | Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Mimika | Rp 67 M | PN Jayapura |
| 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap | Silvi Herawaty | Direktur PT. Asian One Air | Rp 69 M | PN Jayapura |
| 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst | Stanley MA | Senior Manager Corporate affair Permata Hijau Group | Rp 868 M | PN Jakarta |

Vonis Pencabutan Hak Tertentu

Ada 13 vonis pencabutan hak tertentu. Secara lebih spesifik, 11 dijatuhkan pencabutan hak untuk dipilih, sedangkan 2 lainnya dicabut hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah.

Vonis Pencabutan Hak Tertentu

Ada 13 vonis pencabutan hak tertentu. Secara lebih spesifik, 11 dijatuhi pencabutan hak untuk dipilih, sedangkan 2 lainnya dicabut hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah. Dalam satu perkara terdapat putusan yang mencabut seluruh hak politik terdakwa, yakni nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PN JMB dengan jumlah pelaku sebanyak enam anggota DPRD Provinsi Jambi.

Pengurangan Vonis Pencabutan Hak Politik

| No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Tuntutan Pencabutan Hak Politik | Vonis Pencabutan Hak Politik | Pengadilan |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|
| 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby | Sahat Tua P. Simandjuntak | Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur | 5 tahun | 4 tahun | PN Surabaya |
| 88/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg | Yana Mulyana | Walikota Bandung 2022-2023 | 3 tahun | 2 tahun | PN Bandung |

TREN VONIS 2023

Vonis Bebas dan Lepas

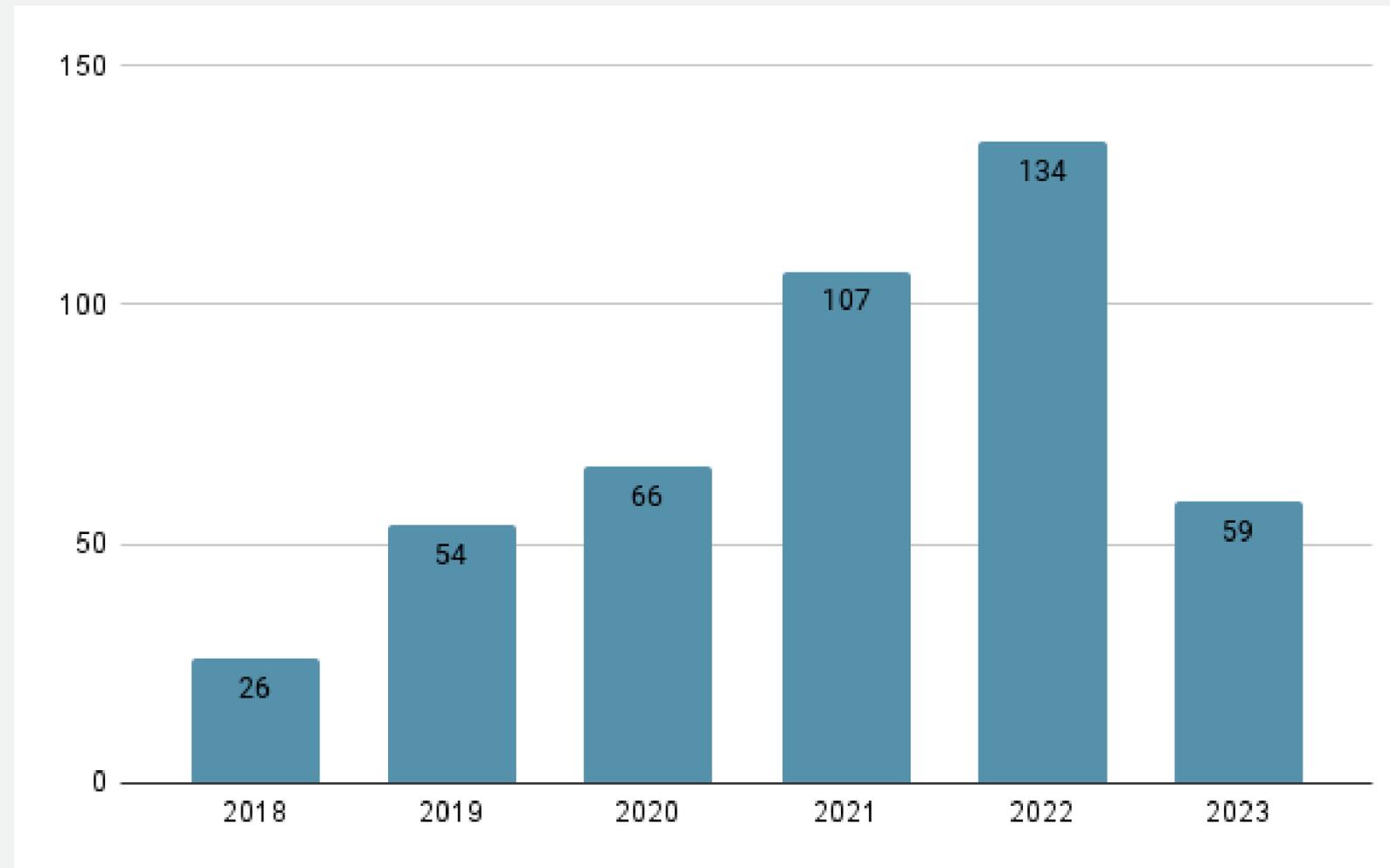
Berdasarkan pemantauan tahun 2023, setidaknya terdapat 59 orang divonis bebas dan lepas.
Lebih rinci, 48 orang dibebaskan dan 11 diantaranya diputus lepas.

Pengadilan Vonis Bebas dan Lepas

| No | Nama Pengadilan | Jumlah Diputus Bebas/Lepas |
|----|------------------|----------------------------|
| 1 | PN Jayapura | 3 |
| 2 | PN Medan | 6 |
| 3 | PN Pontianak | 8 |
| 4 | PN Tanjungpinang | 9 |
| 5 | PN Makassar | 16 |

TREN VONIS 2023

Tren Vonis Bebas/Lepas



TREN VONIS 2023

Disparitas Putusan - Kerugian Negara

| No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Kerugian Negara | Vonis | Pasal |
|----------------------------|------------------|---|-----------------|---------|---------|
| 30/pid.sus-tpk/2022 Pn Bjm | Muhni | Kepala Desa Kolam Kanan | Rp 860 juta | 4 tahun | Pasal 2 |
| 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr | Jumayadi | Kepala Desa Banyu Urip Tahun 2019 | Rp 346 juta | 5 tahun | Pasal 2 |
| 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk | Tumon Abdurahman | Kepala Desa Kaburan Periode tahun 2015 s/d tahun 2021 | Rp 975 juta | 4 tahun | Pasal 2 |
| 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr | Lalu Sujarwadi | Kepala Desa Pasir Putih | Rp 539 juta | 5 tahun | Pasal 2 |

TREN VONIS 2023

Disparitas Putusan - Suap

| No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Suap | Vonis | Pasal |
|--------------------------------|-------------------------|--|-------------|-----------|----------|
| 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr | Anugrahadi Kuswara | Kepala UPT Daerah Pasar Wilayah Cakranegara dan Sandubaya Dinas Perdagangan Kota Mataram | Rp 45 juta | 1 tahun | Pasal 11 |
| 56/pid.sus-tpk/2022 Pn Pal | Michal Andersen Tampoma | PNS di BPN Kota Palu | Rp 5,5 juta | 1,5 tahun | Pasal 11 |
| 113/PID.SUS-TPK/2022/PN MKS | Gilang Gumilar | Staf Humas dan TU Kalan BPK Sulsel | Rp 2,9 M | 5 tahun | Pasal 12 |
| 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst | Harno Trimadi | Direktur Prasarana Perkeretaapian pada Dirjen Perkeretaapian Kemenhub | Rp 900 juta | 5 tahun | Pasal 12 |

TREN VONIS 2023

Indikator Vonis PerMA 1 2020

- Paling ringan (kerugian negara maksimal Rp 200 juta, ancaman penjara minimal 1 tahun)
- Ringan (kerugian negara di atas Rp 200 juta, ancaman penjara minimal 4 tahun)
- Sedang (kerugian negara di atas Rp 1 miliar, ancaman penjara minimal 6 tahun)
- Berat (kerugian negara di atas Rp 25 miliar, ancaman penjara minimal 8 tahun)
- Sangat berat (kerugian negara di atas Rp 100 miliar, ancaman penjara minimal 10 tahun)

Penyimpangan PerMA 1 2020 - Ringan

| No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Kerugian Negara | Vonis |
|----------------------------|---------------|--|-----------------|-----------|
| 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby | Edi Santoso | Kepala Desa Mundurejo Jember | Rp 242 juta | 1 tahun |
| 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg | Ilyas Ismail | Wali Nagari Languang periode 2014 sampai dengan 2020 | Rp 457 juta | 2 tahun |
| 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp | Hendra Apollo | Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Rp 781 juta | 1,5 tahun |

TREN VONIS 2023

Penyimpangan PerMA 1 2020 - Sedang

| No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Kerugian Negara | Vonis |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 106/PID.SUS-TPK/2022/PN MKS | Suratman | Direktur PDAM Kab Sinjai 2014 - 2020 | Rp 2 miliar | 4 tahun |
| 20/pid.sus-tpk/2023 Pn PTK | Razali Bustam | Direktur PT Malabar Mandiri | Rp 2,1 miliar | 1 tahun 3 bulan |
| 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst | Rianto Marbun | Direktur PT. Dor Ma Uli | Rp 13,6 miliar | 5 tahun |

TREN VONIS 2023

Penyimpangan PerMA 1 2020 - Berat

| No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Kerugian Negara | Vonis |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst | Edward Seky | Pendiri/Direktur Ortus Holding, Pendiri Golden Hill Energi Fund dan Pendiri/ Direktur Sunrise Assets.Group Limited | Rp 32,7 M | 2 tahun 9 bulan |
| 18/PID.SUS-TPK/2023/PN SRG | Darwinis | Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten | Rp 58 M | 3 tahun |
| 17/pid.sus-tpk/2023 Pn PTK | Prayitno | PPK Pembangunan Gedung BPPTD Kalimantan Barat | Rp 32,5 M | 4 tahun |

TREN VONIS 2023

Penyimpangan PerMA 1 2020 - Sangat Berat

| No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Kerugian Negara | Vonis |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------|---------|
| 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg | Kemas Danial | Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Rp 116 M | 9 tahun |
| 66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst | Bety | Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Danatama Sekuritas | Rp 431 M | 4 tahun |
| 10/PID.SUS-TPK/2023/PN SRG | Fazwar Bujang | Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2007 - 2012 | Rp 6,7 T | 5 tahun |

TREN VONIS 2023

Vonis Bermasalah

| No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Kerugian Negara/Suap | Pasal | Vonis |
|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst | Edward Seky | Direktur Ortus Holding, Pendiri Golden Hill Energi Fund | Rp 32,7 M | Pasal 3 | 2 tahun 9 bulan |
| 18/PID.SUS-TPK/2023/PN SRG | Darwinis | Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten | Rp 58 M | Pasal 2 ayat (1) | 3 tahun |
| 108/PID.SUS-TPK/2022/PN MKS | Jusieandra Pribadi Pampang | Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa | Rp 48 M | Pasal 5 | 2,5 tahun |

TREN VONIS 2023

Jumlah Kerugian Negara

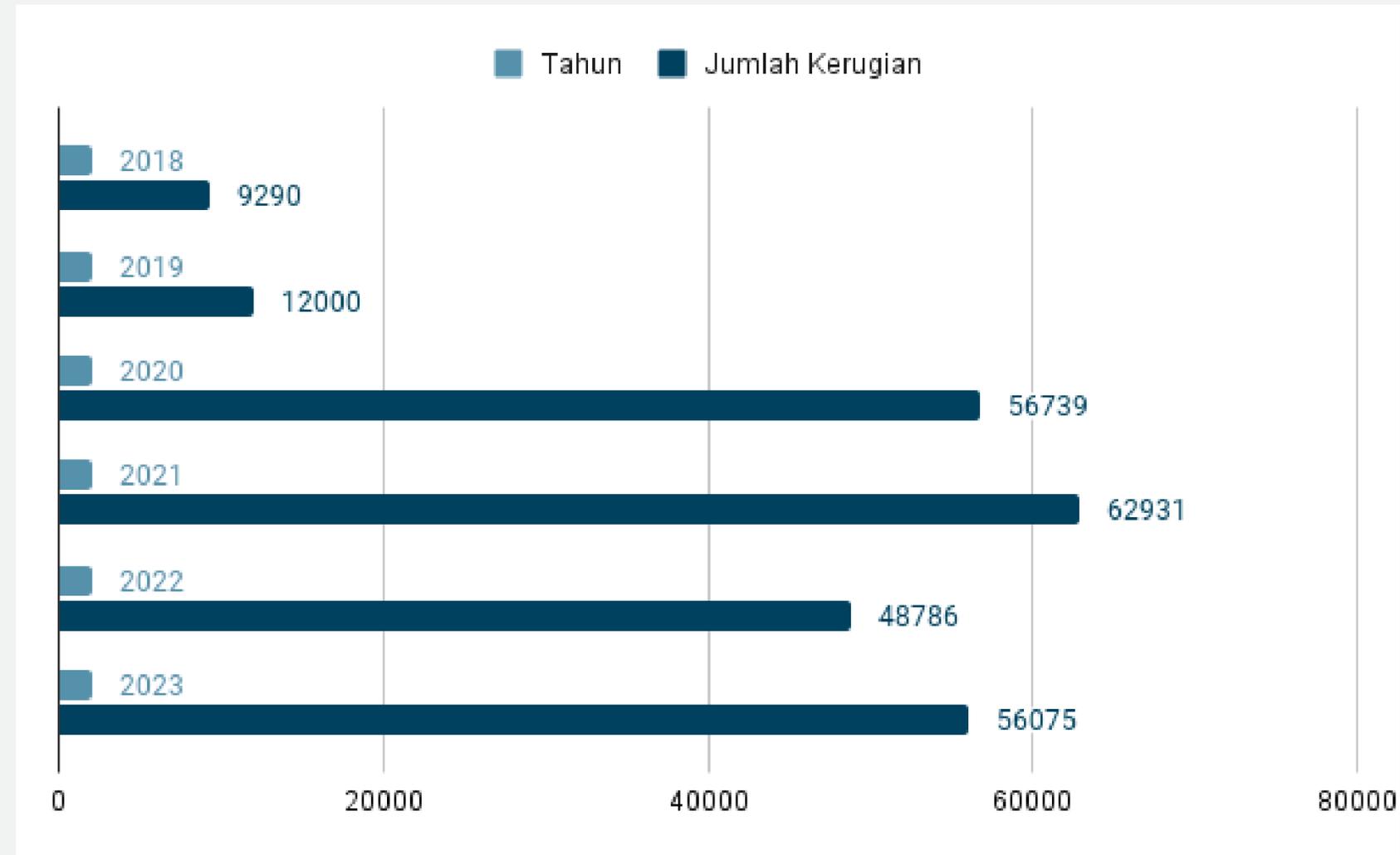
Jumlah kerugian negara yang berhasil terpantau dalam proses persidangan korupsi sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp 56.075.087.787.308

Kasus Kerugian Negara Terbesar 2023

| No Perkara | Nama Terdakwa | Pekerjaan | Kerugian Negara |
|--------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 80/pid.sus-tpk/2023 pn jkt | Moch Rizal Otoluwa | Direktur Utama PT Quartee Technologies | Rp 236 M |
| 66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst | Bety | Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Danatama Sekuritas | Rp 431 M |
| 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst | Benny Tjokrosaputro | Komisaris PT. Hanson International Tbk | Rp 5,7 T |
| 10/PID.SUS-TPK/2023/PN SRG | Fazwar Bujang | Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2007 - 2012 | Rp 6,7 T |
| 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst | Surya Darmadi | Pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari dan PT Palma | Rp 41 T |

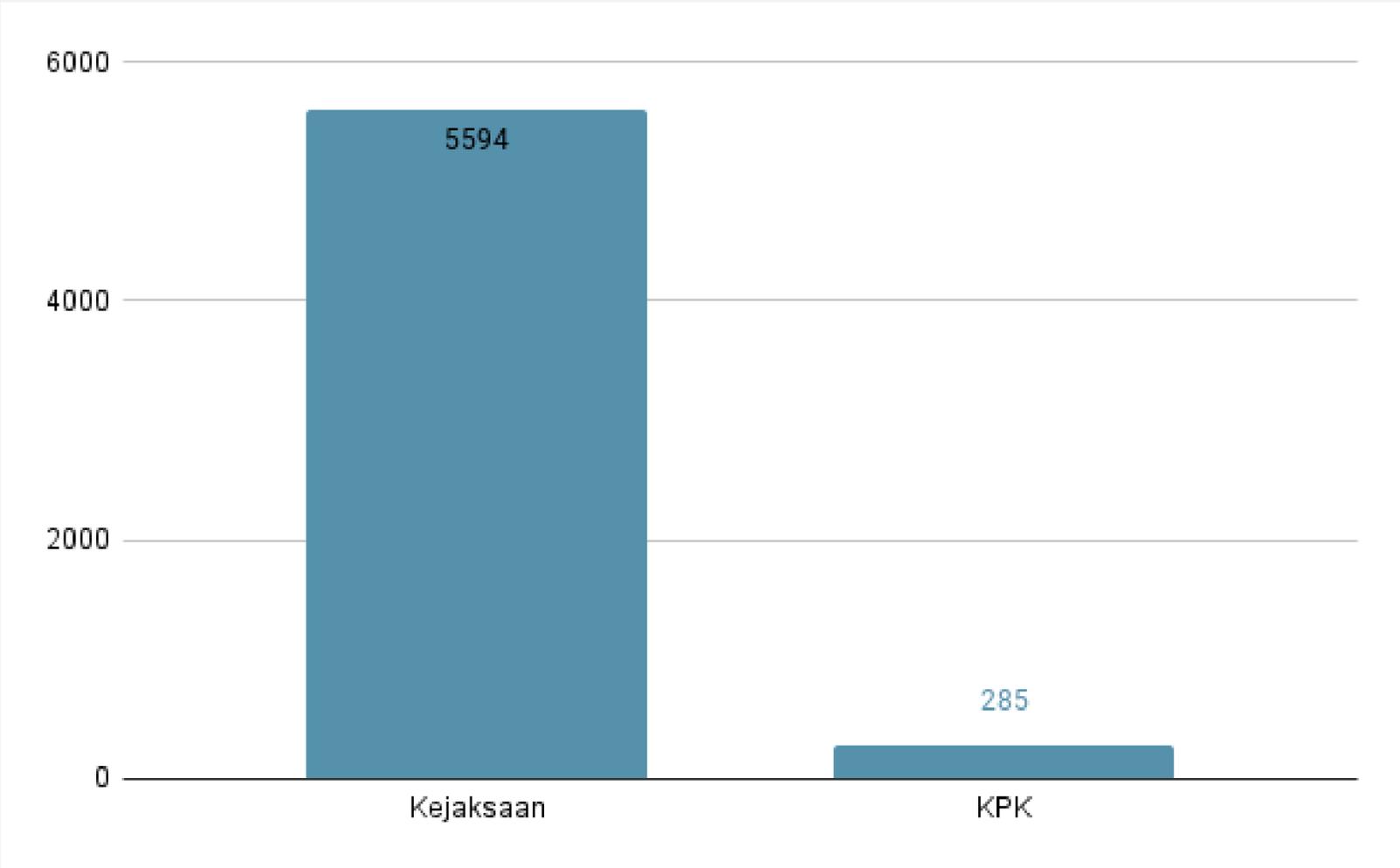
TREN VONIS 2023

Tren Kerugian Negara



TREN VONIS 2023

Kerugian Negara - Penuntut Umum



TREN VONIS 2023

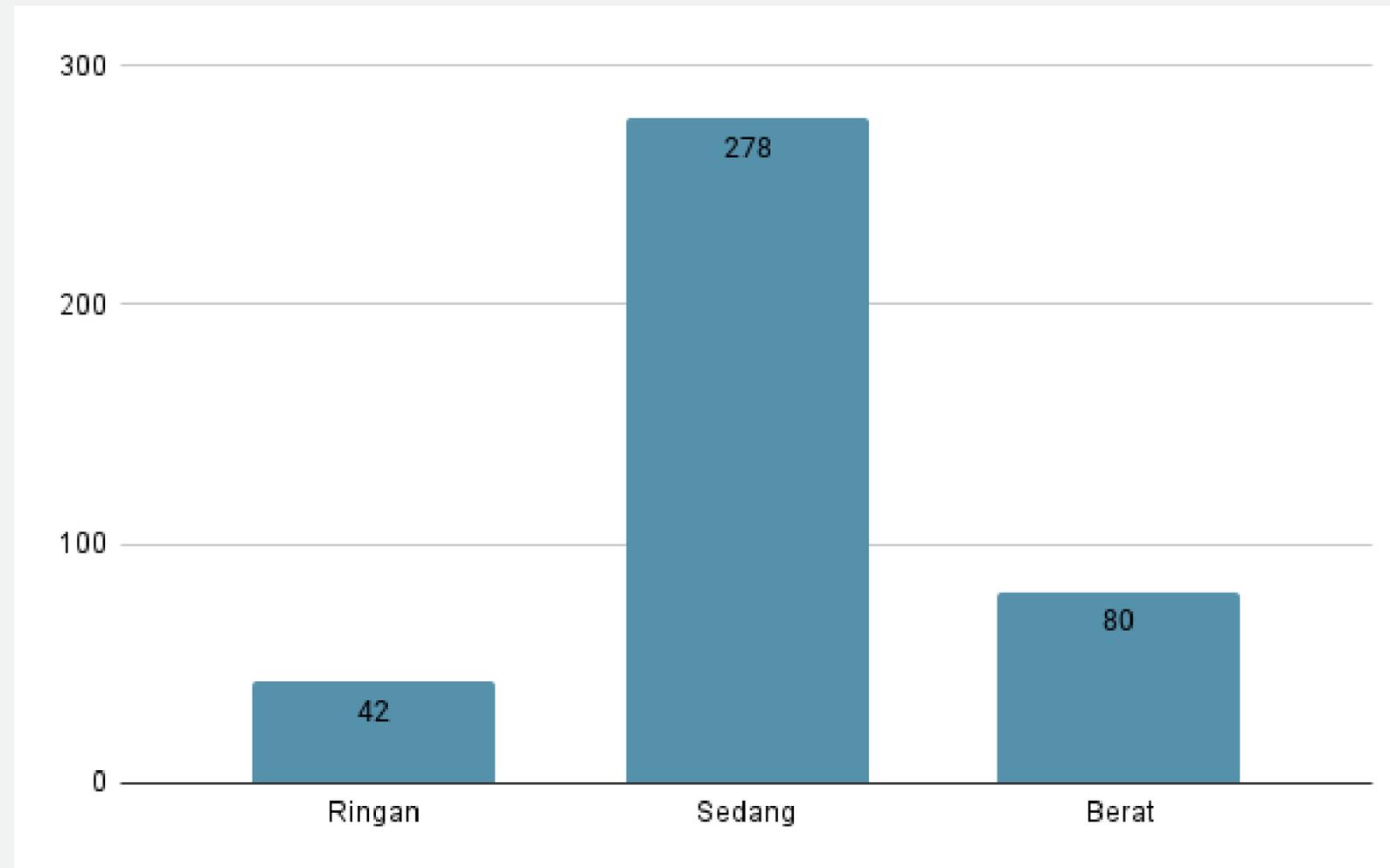
Jumlah Suap/Gratifikasi/Pemerasan

Jumlah suap-menyuap sebesar Rp 288.167.391.772. Kemudian, jumlah gratifikasi sebesar Rp 124.346.839.098. Sedangkan pemerasan sebesar Rp 1.994.978.709.

Rata-Rata Vonis Banding

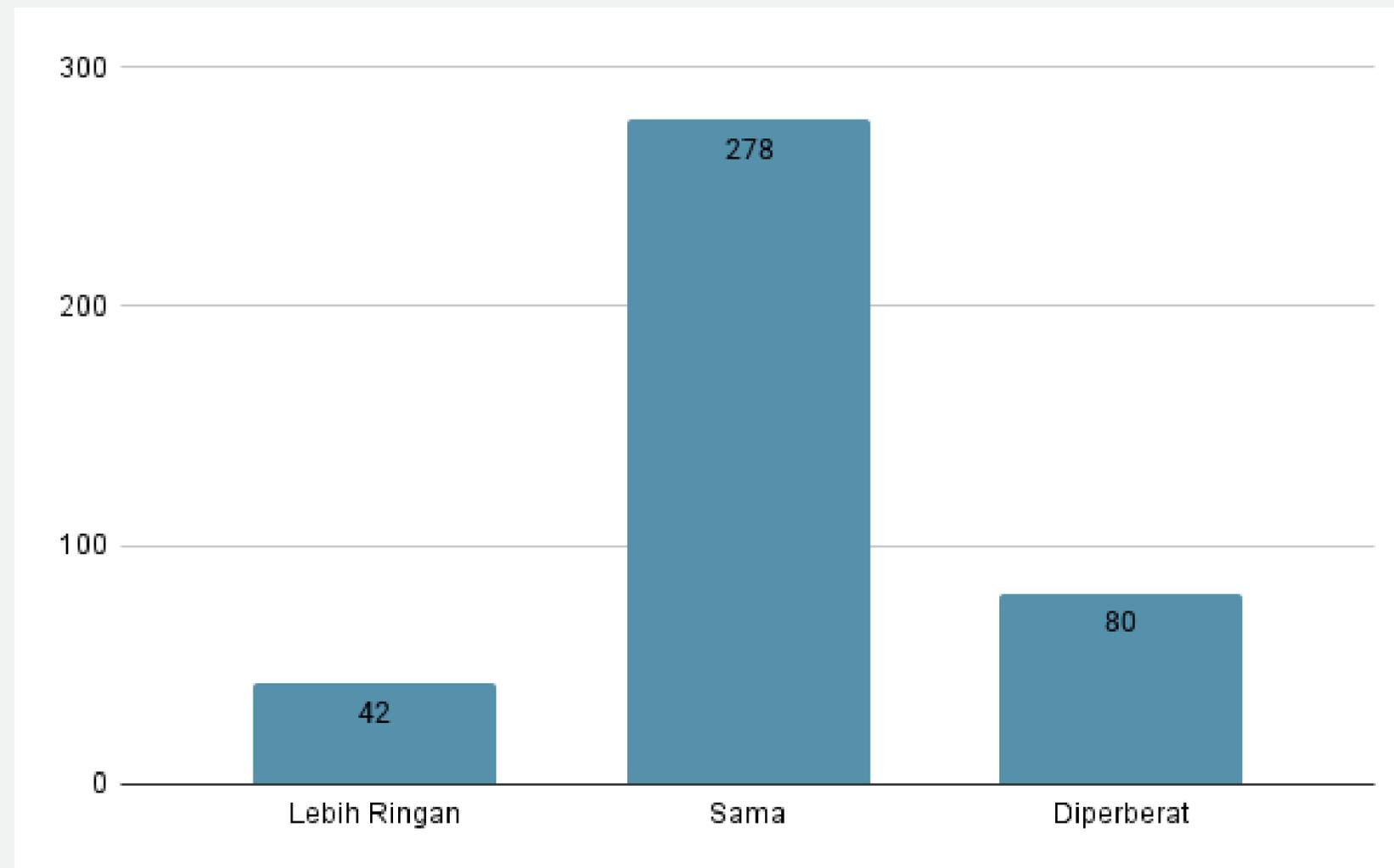
Rata-rata vonis tingkat banding adalah 4 tahun 1 bulan penjara.

Kategori Vonis Banding



TREN VONIS 2023

Tren Putusan Banding



TREN VONIS 2023

Rata-Rata Vonis Kasasi/Peninjauan Kembali

Rata-rata vonis tingkat kasasi/PK adalah 4 tahun 4 bulan penjara.

Kesimpulan

- Laman direktori putusan MA terbilang cukup baik. Sebab, masyarakat dapat dengan mudah melakukan kategorisasi pencarian putusan. Meskipun, pada sisi lainnya, kecepatan mengunggah putusan dari pengadilan harus terus ditingkatkan.
- Terdapat penurunan jumlah perkara dan terdakwa pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Mayoritas terdakwa yang disidangkan sepanjang tahun 2023 berusia di atas 30 tahun.
- Pemantauan tahun 2023 menemukan dari segi latar belakang pekerjaan terdakwa didominasi oleh pihak swasta, pegawai pemerintahan daerah, dan kepala desa. Sedangkan berdasarkan penuntut umum, Kejaksaan banyak menuntut aktor swasta, pegawai pemerintah daerah, dan kepala desa. Kemudian, KPK mayoritas menuntut swasta, pegawai pemerintah daerah, dan kepala daerah.
- Dari tujuh jenis korupsi, penuntut umum paling banyak menggunakan delik kerugian keuangan negara pada surat dakwaan.
- Pemantauan ini menemukan, dari 897 terdakwa, praktis hanya 17 orang yang didakwa dengan delik pencucian uang.

Kesimpulan

- Penuntut umum lebih banyak menggunakan Pasal 2 ketimbang Pasal 3 dalam menuntut terdakwa korupsi.
- Rata-rata tuntutan sepanjang tahun 2023 adalah 4 tahun 11 bulan penjara. Sedangkan untuk pidana penjara pengganti, rata-rata tuntutannya adalah 2 tahun 2 bulan penjara.
- Total tuntutan denda sepanjang tahun 2023 sebesar Rp 236 miliar.
- Kejaksaan mengungguli KPK dari aspek rata-rata tuntutan penjara. Lama tuntutannya adalah 7 tahun 5 bulan, sedangkan KPK hanya 4 tahun 10 bulan.
- Mayoritas tuntutan, baik oleh Kejaksaan maupun KPK, masih didominasi tuntutan sedang (482 orang). Sedangkan kategori berat hanya 33 orang.
- Latar belakang pekerjaan sebagai swasta dan pegawai pemerintahan daerah mendominasi tuntutan ringan sepanjang tahun 2023.

Kesimpulan

- Dilihat dari penuntut umumnya, baik Kejaksaan maupun KPK, banyak menuntut terdakwa dengan kategori hukuman penjara sedang.
- Total tuntutan pidana tambahan uang pengganti yang dituntut penuntut umum sebesar Rp 83 triliun. Dominasi uang pengganti sebagai tuntutan dilakukan oleh Kejaksaan dengan total Rp 82 triliun. Sedangkan KPK hanya Rp 675 miliar.
- Dari 27 terdakwa yang berasal dari sektor politik, 15 orang diantaranya dicabut hak politik dalam surat tuntutan. Dominasi penuntut umum yang mencabut hak politik terdakwa adalah KPK.
- Delik kerugian keuangan negara, majelis hakim banyak memutuskan dengan menggunakan Pasal 3 ketimbang Pasal 2.
- Rata-rata vonis tahun 2023 adalah 3 tahun 4 bulan penjara.
- Dari total 830 persidangan, total penjatuhan hukuman denda adalah sebesar Rp 149 miliar.
- Putusan pemenjaraan didominasi oleh vonis ringan (615 orang), sedangkan berat hanya 10 orang.
- Pengadilan Surabaya dan Jakarta paling banyak menjatuhkan hukuman ringan kepada terdakwa korupsi.

Kesimpulan

- Vonis pidana tambahan uang pengganti sepanjang tahun 2023 adalah Rp 7,3 triliun.
- Terdapat 13 orang yang dijatuhi pencabutan hak tertentu, diantaranya, 11 orang hak politik dicabut dan 2 lagi dicabut haknya untuk mengikuti lelang proyek pemerintah.
- Sepanjang tahun 2023, setidaknya terdapat 59 orang, dengan rincian 48 orang dibebaskan dan 11 diantaranya diputus lepas.
- Pengadilan paling banyak membebaskan terdakwa korupsi adalah Pengadilan Makassar.
- Disparitas pemidanaan masih kerap tampak dalam pemantauan persidangan sepanjang tahun 2023. Efektivitas pedoman pemidanaan juga belum maksimal.
- Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 56 triliun. Sedangkan suap menyuap sebesar Rp 288 miliar. Lalu, gratifikasi yang tergolong suap sebanyak Rp 124 miliar. Untuk pemerasan sebesar Rp 1,9 miliar.
- Perkara dengan jumlah kerugian negara besar banyak ditangani oleh Kejaksaan ketimbang KPK. Bila dihitung, Kejaksaan menangani Rp 55 triliun, sedangkan KPK hanya Rp 285 miliar.
- Dari 561 persidangan tingkat banding dengan jumlah terdakwa sebanyak 582 orang, rata-rata hukuman penjaranya adalah 4 tahun 1 bulan. Jika dirincikan lagi, mayoritas vonis banding berada pada kategori ringan (336 orang). Sedangkan berat hanya 10 terdakwa.
- Rata-rata putusan Mahkamah Agung, baik kasasi maupun peninjauan kembali adalah 4 tahun 4 bulan penjara.

Rekomendasi - Mahkamah Agung

- Meningkatkan performa direktori putusan Mahkamah Agung dengan memberikan tenggat waktu yang jelas bagi pengadilan untuk mengunggah putusan. Bahkan, bila diperlukan, ada sanksi administratif yang dijatuhkan bagi pengadilan yang terlambat mengunggah.
- Mengevaluasi efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan untuk menekan fenomena disparitas antar putusan.
- Menyusun pedoman pemidanaan bagi jenis korupsi lain, salah satunya tindak pidana suap.
- Badan Pengawas harus mulai aktif melihat hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan atau bebas kepada terdakwa untuk memastikan proses persidangan yang diikuti

Rekomendasi - Komisi Yudisial

- Komisi Yudisial harus mencermati proses persidangan tindak pidana korupsi dengan indikator tertentu guna memastikan tidak adanya pelanggaran etik.
- Komisi Yudisial dapat melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan ganjil yang dikeluarkan oleh lembaga kekuasaan kehakiman

Rekomendasi - Kejaksaan Agung & KPK

- Kejaksaan Agung harus mulai menerapkan tuntutan pencabutan hak politik terhadap terdakwa dengan latar belakang politik, baik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif.
- KPK harus mulai banyak mendakwa terdakwa korupsi dengan delik-delik yang terkait kerugian keuangan negara.
- Pertimbangan pemberatan hukuman yang diatur dalam Pasal 52 KUHP harus dipertimbangkan oleh penuntut umum.
- Pedoman penuntutan yang diterbitkan oleh Kejaksaan atau KPK harus juga memuat pertimbangan latar belakang pekerjaan terdakwa sebagai alasan pemberat tuntutan.
- KPK dan Kejaksaan Agung harus mempertimbangkan untuk memasukkan delik anti pencucian uang dalam surat dakwaan maupun tuntutan.

Rekomendasi - Pemerintah dan DPR

- Pemerintah dan DPR harus segera mengundang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar pemulihan kerugian akibat praktik korupsi bisa dimaksimalkan.
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus direvisi untuk meningkatkan hukuman bagi pelaku.

THANK YOU

